



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Basis Data Terpadu 2015

Untuk Memilah Penerima Manfaat Program Penanganan Fakir Miskin
berdasarkan Kriteria Program



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
GEDUNG GRAND KEBON SIRIH
JL KEBON SIRIH 35, JAKARTA PUSAT

www.tnp2k.go.id



**Basis Data Terpadu
2015**



BASIS DATA TERPADU 2015: UNTUK MEMILAH PENERIMA MANFAAT PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN BERDASARKAN PARAMETER YANG DIINGINKAN

September 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
© 2017 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Foto sampul dan halaman bab: Fauzan Ijazah/MAHKOTA Program

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K-Communication Unit (info@tnp2k.go.id).

Laporan ini juga tersedia di website TNP2K (www.tnp2k.go.id)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511

E-mail: info@tnp2k.go.id

Website: www.tnp2k.go.id



Daftar Isi

Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Abstrak.....	xi
Pengantar.....	xii
Ucapan Terima Kasih.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv

1. KEKUATAN BASIS DATA TERPADU 2015 2

1.1. Peran BDT dalam Pengembangan Berbagai Program Perlindungan Sosial.....	3
1.2. Kilas Balik Pembangunan Basis Data Terpadu.....	3
1.3. Pemutakhiran BDT 2015.....	5
1.4. Inovasi Pada Pemutakhiran BDT 2015.....	6
1.5. Tahapan Dalam Pemutakhiran BDT 2015.....	6

2. PENTINGNYA DAFTAR AWAL RUMAH TANGGA 10

2.1. Daftar Awal dan Kesenambungan Data.....	10
2.2. Input Utama Daftar Awal Pemutakhiran BDT 2015.....	11

3. KONSULTASI PUBLIK 14

3.1. Upaya Melibatkan <i>Stakeholders</i>	14
3.2. Proses dan Pelaksanaan Lapangan.....	14
3.2.1. Partisipan FKP.....	14
3.2.2. Cakupan Wilayah dan Jadwal Pelaksanaan.....	15
3.2.3. Instrumen Pendukung.....	17
3.2.4. Target <i>Output</i>	17
3.3. Hasil Pelaksanaan FKP.....	17

4. PENDATAAN RUMAH TANGGA 22

4.1. Metodologi dan Cakupan.....	22
4.1.1. Satuan Wilayah Kerja.....	22
4.1.2. Data yang Dikumpulkan.....	23
4.1.3. Dokumen yang Digunakan.....	23
4.1.4. Mekanisme Pendataan.....	24
4.1.5. Konfirmasi Rumah Tangga Miskin Tambahan.....	24
4.2. Pengorganisasian Kegiatan Pencacahan di Lapangan.....	25
4.3. Pengawasan Kualitas Pendataan.....	25
4.4. Gambaran Umum Hasil Pendataan.....	26
4.5. Perlakuan Khusus: Pendataan Papua dan Papua Barat.....	31

4.5.1.	Metode yang digunakan.....	31
4.5.2.	Deskripsi Singkat Hasil Pendataan Wilayah Papua.....	32
5. PEMERINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI		36
<hr/>		
5.1.	Pemilihan Data dan Sampel untuk Pemodelan.....	37
5.1.1.	Jumlah Data Sebagai Sampel.....	37
5.1.2.	Karakteristik SUSENAS.....	38
5.1.3.	Rekomposisi Pembobot Rumah Tangga dan Individu.....	38
5.1.4.	Indeks Kesulitan Geografis (IKG).....	39
5.1.5.	Penyesuaian Harga Pengeluaran Rumah Tangga.....	39
5.2.	Pemilihan Variabel.....	40
5.2.1.	Variabel <i>independent</i> atau variabel bebas.....	40
5.2.2.	Variabel <i>dependent</i> atau variabel terikat	41
5.3.	Pemilihan Model.....	42
5.3.1.	Tahap Uji Awal Statistik.....	42
5.3.2.	Kriteria Pemilihan Model.....	43
5.3.3.	Penyesuaian Model dari Hasil <i>Ground Check</i>	44
5.4.	Proses Estimasi dan Pemberian Skor.....	46
5.5.	Proses Transformasi Persentil.....	46
5.6.	Contoh Penerapan Hasil.....	48
5.6.1.	Cara Menetapkan Jumlah Rumah Tangga 10% Terbawah Nasional di Kota Denpasar.....	48
5.6.2.	Cara Menetapkan Sasaran Program Indonesia Pintar.....	50
6. TANTANGAN PENYEMPURNAAN BERKELANJUTAN		54
<hr/>		
LAMPIRAN		57
<hr/>		
1.	Contoh Daftar Awal Rumah Tangga: PBDT2015.PPLS.....	57
2.	Contoh Daftar Awal Rumah Tangga: PBDT2015.Program.....	57
3.	Contoh Daftar Awal Rumah Tangga: PBDT2015.Lainnya.....	58
4.	Contoh Lembar Berita Acara Pelaksanaan FKP.....	59
5.	Jumlah Rumah Tangga <i>Pre-list</i> Awal Menurut Provinsi dan Sumbernya menurut Provinsi.....	60
6.	Jumlah Rumah Tangga <i>Pre-list</i> Awal, Verifikasi FKP, Usulan FKP dan Prelist Pendataan.....	61
7.	Jumlah Rumah Tangga <i>Pre-list</i> Pendataan, Tidak Ditemukan, <i>Sweeping</i> dan Hasil Pendataan.....	62
8.	Jumlah Rumah Tangga <i>Pre-list</i> Pendataan, Tidak Ditemukan, <i>Sweeping</i> dan Hasil Pendataan.....	63



9.	Jumlah Rumah Tangga <i>Pre-list</i> Awal, Verifikasi FKP, Usulan FKP dan Prelis Pendataan.....	64
10.	Jumlah Rumah Tangga <i>Pre-list</i> Awal, Hasil FKP, Hasil Pendataan dan Hasil Akhir (BDT 2015).....	65
11.	Contoh Dokumen Daftar Final PBDT2015.FKP.....	66
12.	Contoh Dokumen Kuesioner Rumah Tangga PBDT2015.RT.....	66
13.	Daftar Variabel PMT 2015.....	67
14.	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Lokasi FKP dan RTS menurut Provinsi.....	75

REFERENSI

76

Daftar Gambar

Gambar 1. Perbandingan penetapan sasaran program saat ini yang memanfaatkan BDT dengan periode sebelumnya.....	3
Gambar 2. Alur Kegiatan FKP di Kecamatan.....	15
Gambar 3. Struktur Model Pelaksanaan FKP.....	16
Gambar 4. Komposisi Daftar Awal Rumah Tangga Sasaran Pendataan BDT 2015 (<i>Pre-list</i>).....	18
Gambar 5. Ringkasan Hasil Pelaksanaan FKP Berdasarkan <i>Pre-list</i> Awal dan Akhir.....	19
Gambar 6. Presentase Rumah Tangga Pindah Meninggal dan Tidak Dikenal Terhadap <i>Pre-list</i> Awal Berdasarkan Hasil FKP.....	19
Gambar 7. Presentase Penjangkauan Rumah Tangga Miskin dan Rentan Terhadap <i>Pre-list</i> Akhir Berdasarkan Hasil FKP.....	20
Gambar 8. Organisasi lapangan PBDT 2015 di daerah.....	25
Gambar 9. Ringkasan Hasil Pendataan Berdasarkan <i>Pre-list</i> Awal dan Hasil Pendataan.....	27
Gambar 10. Presentase Rumah Tangga dalam <i>Pre-list</i> Akhir yang Tidak Ditemukan Saat Proses Pendataan.....	27
Gambar 11. Presentase Rumah Tangga Hasil Pendataan Berdasarkan Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin.....	28
Gambar 12. Ringkasan Hasil Pendataan Rumah Tangga.....	29
Gambar 13. Presentase Rumah Tangga dengan ART dalam Daftar Negatif Terhadap Total Hasil Pendataan.....	29
Gambar 14. Presentase Rumah Tangga yang Dinyatakan Tidak Layak Berdasarkan FKP Terhadap Total Hasil Pendataan.....	30
Gambar 15. Ringkasan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015.....	30
Gambar 16. <i>Pre-list</i> Awal Menurut Sumber Data yang Digunakan di Wilayah Papua.....	32
Gambar 17. Proporsi Rumah Tangga Pindah Meninggal dan Tidak Dikenal Terhadap <i>Pre-list</i> Awal Berdasarkan Hasil <i>Ground Check</i> di Wilayah Papua.....	32
Gambar 18. Ringkasan Hasil Pendataan di Wilayah Papua.....	33
Gambar 19. Ringkasan Jumlah <i>Pre-list</i> Awal, <i>Pre-list</i> Akhir dan Hasil Pendataan Provinsi Papua dan Papua Barat.....	33
Gambar 20. Perbandingan Variabel Terikat, Tanpa Log dan Dengan Log.....	41



Daftar Tabel

Tabel 1. Sumber Daftar Awal Sasaran Pendataan Rumah Tangga Miskin, 2005-2011.....	11
Tabel 2. Sumber Daftar Awal Rumah Tangga dalam PBDT 2015.....	12
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	16
Tabel 4. Klasifikasi Variabel Menurut Kelompok.....	42
Tabel 5. Distribusi Rumah Tangga Menurut Persentil dan Metode yang Digunakan.....	49



Abstrak

Basis Data Terpadu (BDT) 2015 adalah sebuah sistem basis data elektronik mengenai rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang dikelola dan disimpan oleh TNP2K. Data ini dirancang khusus untuk mendukung kementerian dan lembaga yang ingin merencanakan suatu program pengentasan kemiskinan. BDT 2015 mencakup 40% dari populasi Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Basis data ini mencakup tidak hanya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi juga mereka yang tergolong rentan.

Sesuai namanya, basis data ini diperbarui pada tahun 2015 dengan mengakomodasi semua data rumah tangga miskin yang ada sebelumnya. Data yang diadopsi antara lain berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, Program Raskin, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN, Kartu Perlindungan Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mendapatkan data pengeluaran bulanan rumah tangga, BDT 2015 dikalibrasi menggunakan data SUSENAS 2011 – 2014.

Sebagai parameter kesejahteraan/kemiskinan, selain pengeluaran bulanan rumah tangga, BDT 2015 juga menyediakan beberapa parameter lain, yakni demografi, pendidikan, pekerjaan, fasilitas rumah tangga, kepemilikan aset serta Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Dengan demikian dimensi kemiskinan dapat dilihat secara lebih beragam tidak hanya berdasarkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan parameter yang lebih beragam, perencana program pengentasan kemiskinan dapat memilah data calon penerima manfaat sesuai kriteria program.

Kelebihan lain dari BDT 2015 adalah tersedianya data dalam format *by name by address*, sehingga penargetan dapat lebih akurat. Hal ini akan sangat membantu dalam penghitungan jumlah dana yang diperlukan suatu program penanggulangan kemiskinan. Format data BDT 2015 ini juga sangat membantu dalam pendistribusian manfaat program, karena jelas keberadaan sasaran penerimanya.



Pengantar

Buku "Basis Data Terpadu 2015 untuk Memilah Penerima Manfaat Program Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Kriteria Program" ini berisi penjelasan mengenai kekuatan dan manfaat basis data yang dimutakhirkan pada tahun 2015. Diawali dengan sejarah singkat basis data, buku ini berisi penjelasan tentang pentingnya penentuan data awal, inovasi pada saat pengumpulan data di lapangan serta inovasi dalam metodologi pengolahan data. Selain itu, buku ini juga menjelaskan beberapa faktor koreksi yang digunakan agar data memenuhi kaidah statistik, serta berbagai formula yang digunakan. Pada bagian akhir disertakan dua contoh cara memanfaatkan data sesuai kebutuhan.

Pembangunan Basis Data Terpadu (BDT) dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam penargetan rumah tangga miskin, memerlukan upaya pemutakhiran berkelanjutan. Selain itu, upaya lain yang tak kalah pentingnya adalah selalu mengembangkan metodologi penetapan sasaran yang lebih komprehensif. Hal ini penting karena program pengentasan kemiskinan yang dirancang berdasarkan data akurat akan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu pembangunan basis data terpadu perlu mendapat dukungan dari seluruh *stakeholders*, terutama mengingat besarnya biaya dan waktu yang diperlukan.

Pemutakhiran BDT 2015 menggunakan metode *Proxy Mean Testing* (PMT). Pendekatan ini banyak digunakan oleh negara-negara yang menjalankan program perlindungan sosial. Pengembangan metode penargetan dan penyeleksian yang lebih akurat dilakukan dengan memadukan teknik regresi dalam statistik, *data mining* serta konsultasi dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi pendataan. Kualitas data yang meningkat akan memudahkan implementasi program bantuan sosial, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh kementerian/ lembaga sebagai perencana, pemerintah daerah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Dalam kesempatan ini, Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf TNP2K yang telah berkontribusi dalam Pemutakhiran BDT 2015 serta penyusunan dokumen ini. Seperti layaknya buku pegangan lainnya, buku ini bersifat dinamis sebagai *living document*. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan. Kami berharap semoga BDT 2015 ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang memiliki tanggungjawab dan kepentingan dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Dr. Bambang Widianto

Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat
dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Ucapan Terima Kasih

Sampai saat ini, perjalanan pembangunan serangkaian Basis Data Terpadu (BDT) 2015 sudah melalui tahapan kerja keras berbagai pihak, terutama dalam melibatkan instansi yang selama ini memiliki perhatian serius terhadap pemutakhiran data rumah tangga miskin, terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Sebagaimana dipahami bersama, perbaikan data kemiskinan perlu dilakukan terus menerus, mengingat kemiskinan bersifat dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Demikian pula dalam pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 ini, banyak pihak yang berkontribusi sejak awal hingga akhirnya dapat terselesaikan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih, antara lain kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah berperan besar dalam hal pelaksanaan dan pengawasan. Kontribusi tim BPS dalam pada proses pengumpulan data, telah menjaga BDT 2015 ini menjadi satu kesatuan yang utuh dengan berbagai data yang dikumpulkan sebelumnya.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku anggota tim pengarah pelaksanaan, serta kepada tim Bank Dunia yang telah berkontribusi dalam hal pendampingan. Selain itu kami ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh peneliti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah berpartisipasi dalam pengembangan BDT 2015.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan penghargaan secara khusus kepada para *stakeholders*, yang secara konsisten mendukung penggunaan BDT dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Mereka adalah para perencana program di berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta para pelaksana di pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,

Sebagai penutup kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pembangunan BDT 2015, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Harapan kami, semoga dalam kegiatan-kegiatan pemutakhiran data selanjutnya, kita dapat kembali bekerjasama untuk meningkatkan kualitas BDT. Dengan data yang akurat, program penanggulangan kemiskinan di Indonesia semakin tepat sasaran.



Daftar Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART	Anggota Rumah Tangga
BBM	Bahan Bakar Minyak
BDT	Basis Data Terpadu
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CODEC	<i>Compressor – Decompressor</i>
DKI	Daerah Khusus Ibukota
EE	<i>Exclusion Error (type II error)</i>
ELL	Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw
FKP	Forum Konsultasi Publik
GK	Garis Kemiskinan
GLS	<i>Generalized Least Squares</i>
HSD	<i>Honestly Significant Difference</i>
IE	<i>Inclusion Error (type I error)</i>
Inda	Instruktur Daerah
IPDS	Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
kg	Kilogram
KS	Kolmogorov-Smirnov
MK	Monitoring Kualitas
OLS	<i>Ordinary Least Squares</i>
P4S	Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial
PBDT	Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PCA	<i>Principal Component Analysis</i>
PCE	Percapita Consumption Expenditure
PCL	Petugas Pencacah Lapangan
PKH	Program Keluarga Harapan
PML	Petugas Pemeriksa Lapangan
PMT	<i>Proxy Mean Testing</i>
Podas	Potensi Desa (pendataan sensus desa)
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PSE	Pendataan Sosial Ekonomi
Raskin	Beras untuk Rakyat Miskin
RT	Rumah Tangga
RTHM	Rumah Tangga Hampir Miskin
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTS	Rumah Tangga Sasaran

RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
SAE	<i>Small Area Estimation</i>
SLS	Satuan Lingkungan Setempat
SMS	<i>Short Message Service</i>
SOP	<i>Standard Operating Procedures</i>
SP	Sensus Penduduk
SPDKP	Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
SUSENAS	Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UDB	<i>Unified Database</i>
GC	<i>Ground Check</i>





1

Kekuatan Basis Data Terpadu 2015



Kekuatan Basis Data Terpadu 2015

Basis Data Terpadu (BDT) 2015 adalah sebuah sistem basis data elektronik yang berisi informasi rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. Data ini, dirancang khusus untuk mendukung kementerian dan lembaga dalam perencanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. BDT 2015 dibangun dengan mengakumulasi dan mengakomodasi berbagai data rumah tangga miskin yang dikumpulkan dari tahun 2005. Saat ini BDT 2015 mencakup data 28 juta rumah tangga ekonomi terbawah atau menurut proyeksi BPS sekitar 40% dari total rumah tangga Indonesia.

Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah merancang beberapa program yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Misalnya, PBI (Penerima Bantuan Iuran) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan agar masyarakat miskin mendapat jaminan layanan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan dalam bentuk tunai bersyarat di bidang pendidikan dasar dan kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga energi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan harian dan lain-lain. Berbagai program ini dirancang dan dijalankan oleh kementerian yang berbeda sesuai bidang tugasnya.

*BDT 2015
komprehensif
dalam hal jumlah,
tambahan parameter
kemiskinan serta
menyediakan nama
dan alamat calon
penerima manfaat
program.*

Para perancang program semacam itu tentu memerlukan data yang akurat agar programnya tepat sasaran. Untuk keperluan ini, BDT 2015 adalah data yang komprehensif karena menyediakan nama dan alamat serta NIK (Nomor Induk Kependudukan). Dengan demikian, akurasi penerima manfaat program bisa dipertanggungjawabkan. BDT 2015 juga memuat beberapa keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu sehingga tingkat kesejahteraan/kemiskinan dapat dipilah dengan mempertimbangkan beberapa parameter tersebut, tidak hanya diukur dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar saja.

Dibandingkan basis data sebelumnya, keunggulan BDT 2015 tersebut bisa terwujud antara lain berkat adanya beberapa inovasi saat proses pemutakhiran dilakukan. Saat pengumpulan data di lapangan, pembaruan dilakukan antara lain dengan adanya mekanisme Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan *stakeholders* setempat untuk memastikan keberadaan dan tambahan rumah tangga miskin. Saat pengolahan data, pembaruan dilakukan dengan menambahkan metode *Proxy Mean Testing* (PMT) untuk mengukur seberapa besar pengaruh setiap parameter sosial ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan/kemiskinan.

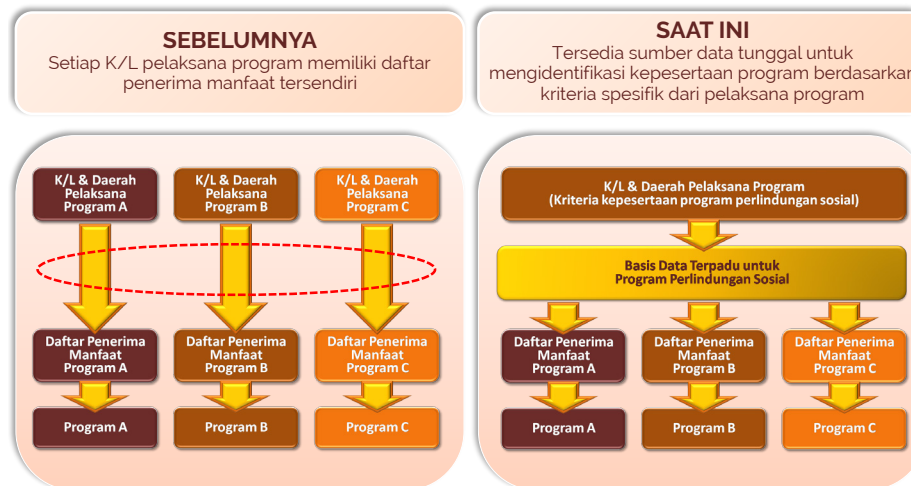
1.1. Peran BDT dalam Pengembangan Berbagai Program Perlindungan Sosial

BDT dimanfaatkan oleh berbagai pelaksana program pengentasan kemiskinan, baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan BDT telah mengubah paradigma pelaksanaan program. Jika sebelumnya kepesertaan program ditentukan oleh masing-masing pelaksana program menggunakan sumber data yang berbeda-beda, dengan adanya BDT, kepesertaan program mulai ditentukan dari satu sumber data yang sama. Saat ini BDT dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang menyediakan akses kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan.

Keberadaan BDT sebagai sumber data tunggal juga berkontribusi terhadap upaya untuk mencapai komplementaritas antar program. Hingga saat ini BDT telah diakses oleh 21 kementerian dan lembaga, 31 provinsi dan 308 kabupaten/kota. Pada prinsipnya, masyarakat umum juga dapat memperoleh akses melalui *website* yang disediakan, meskipun ada pembatasan data.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu dilakukan untuk menjangkau rumah tangga miskin dan rentan, dan meningkatkan peran serta pemerintah daerah.

Gambar 1. Perbandingan penetapan sasaran program saat ini yang memanfaatkan BDT dengan periode sebelumnya



Sumber: TNP2K, 2015

1.2. Kilas Balik Pembangunan Basis Data Terpadu

Pembangunan BDT sebenarnya terkait sejarah panjang upaya pendataan penduduk miskin, yang sudah dimulai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar empat dekade silam. Pada tahun 1976, BPS untuk pertama kalinya menghasilkan data kemiskinan

makro berupa perkiraan jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Data diperoleh melalui **Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)**, kegiatan tahunan pendataan yang sudah dilaksanakan sejak 1963.

Sebagai ukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam hal daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan adalah garis batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Kategori penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

SUSENAS dilaksanakan setiap tahun, namun data kemiskinan makro yang dihasilkan tetap hanya memberikan perkiraan angka agregat penduduk miskin. Data yang ada tidak dapat memberikan nama dan alamat rumah tangga yang dikategorikan miskin. Dua penyebab utama adalah BPS terikat peraturan sesuai Undang-Undang Statistik untuk tidak membuka data responden kepada publik dan Susenas hanya merupakan data survei sehingga hanya dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampel. Akibatnya tidak tersedia data yang dapat dimanfaatkan untuk menyoal calon penerima manfaat suatu program.

Secara spesifik, pembangunan BDT sendiri bisa dikatakan dimulai sejak tahun 2005, meskipun belum sepenuhnya terorganisir dengan baik seperti yang dilakukan akhir-akhir ini. Saat itu, pemicu kebutuhan adanya data induk penduduk miskin yang terpadu adalah keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akibat kebijakan ini harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat turun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin.

Program BLT membuat pemerintah memandang penting tersedianya data rumah tangga miskin beserta anggota keluarganya, *by name by address*, yakni lengkap dengan nama dan alamat. Tujuannya agar ada kejelasan sasaran atau penerima manfaat program. Kebutuhan ini mendasari dilaksanakannya **Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005**. Pendataan ini adalah sensus kemiskinan pertama di Indonesia yang berisi data nama dan alamat rumah tangga miskin, tidak hanya sekedar perkiraan angka agregat.

PSE 2005 menghasilkan data kemiskinan mikro terbesar pada saat itu, karena enumerasi dilakukan terhadap sekitar 19,1 juta rumah tangga atau 32% dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Selain itu, penentuan rumah tangga miskin pada PSE 2005 mulai memanfaatkan sejumlah karakteristik demografi dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Jadi, penentuan rumah tangga miskin tidak lagi menggunakan *basic needs approach* yang mengacu pada besaran nilai konsumsi atau pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimum.

Data PSE 2005 dimutakhirkan oleh BPS pada bulan Oktober 2008 melalui **Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008**. Pemutakhiran ini diperlukan karena dalam waktu tiga tahun, sangat mungkin populasi rumah tangga yang ada telah mengalami perubahan demografi, sosial dan ekonomi. Selama kurun waktu tersebut, terbuka kemungkinan adanya rumah tangga miskin yang berhasil keluar dari kondisi kemiskinan atau sebaliknya.

Dengan pertimbangan yang sama, tiga tahun kemudian data PPLS 2008 dimutakhirkan melalui **PPLS 2011**. Hal yang menjadi catatan penting adalah adanya penambahan jumlah rumah tangga yang menjadi target pemutakhiran data. Hal ini dikarenakan *pre-list* atau daftar awal rumah tangga yang digunakan sebagai dasar pendataan PPLS 2011 berasal dari data **Sensus Penduduk (SP) 2010**. PPLS 2008 menggunakan *pre-list* dari data PSE 2005 yang mencakup sekitar 32% dari seluruh rumah tangga dengan kondisi sosial-ekonomi terendah secara nasional, sedangkan pada PPLS 2011 jangkauan ini naik menjadi 40%.

Dalam hal pengelolaan data hasil PPLS 2011, pemerintah menunjuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai penanggung jawab, termasuk mensosialisasikan hasilnya. Lembaga ini berada di bawah koordinasi kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, sedangkan BPS dalam hal ini ditugaskan sebagai pelaksana lapangan. TNP2K kemudian memperkenalkan data yang dihasilkan PPLS 2011 sebagai Basis Data Terpadu (BDT) atau *Unified Data Base* (UDB).

1.3. Pemutakhiran BDT 2015

Pada tahun 2015, pemerintah kembali berinisiatif memutakhirkan data sekaligus menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam kegiatan pendataan sebelumnya. Kegiatan ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015**.

PBDT 2015 dinilai perlu karena manfaatnya telah dirasakan secara luas oleh pemerintah. Selain itu BDT, hasil PPLS 2011 yang telah berusia empat tahun, diperkirakan tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial - ekonomi. Selama kurun waktu tersebut sangat mungkin terjadi peningkatan kondisi sosial ekonomi pada rumah tangga yang termasuk dalam BDT. Demikian pula sebaliknya, sangat mungkin terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi pada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak masuk dalam BDT.

Pelaksanaan PBDT 2015 didasarkan pada dua payung hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pertama, Perpres No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kedua, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

1.4. Inovasi pada Pemutakhiran BDT 2015

Ada tiga inovasi yang dilakukan pada PBDT 2015. Pertama, daftar awal rumah tangga yang disusun berdasarkan hasil PPLS 2011, dilengkapi dengan data hasil pemutakhiran kepesertaan sejumlah program perlindungan sosial. Berbagai data tersebut antara lain berasal dari hasil pemutakhiran Program Raskin, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN, data rumah tangga berdasarkan Formulir Rekapitulasi Pengganti Kartu Perlindungan Sosial, data kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Inovasi kedua adalah pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat melalui **Forum Konsultasi Publik (FKP)**, untuk menyepakati daftar rumah tangga sasaran pendataan. Selanjutnya, inovasi ketiga adalah dengan melakukan perbaikan pada metodologi pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga melalui pendekatan **Proxy Mean Test (PMT)**.

1.5. Tahapan Dalam Pemutakhiran BDT 2015

Pemutakhiran BDT pada tahun 2015 terdiri dari empat tahapan utama yang saling terkait. Tahap pertama, merupakan tahap persiapan yang terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penyusunan daftar awal rumah tangga dan penyusunan daftar pertanyaan. Penyusunan daftar awal rumah tangga menjadi tanggung jawab TNP2K, sedangkan penyusunan daftar pertanyaan menjadi tanggung jawab BPS. Dalam pelaksanaannya, kedua kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama kementerian dan lembaga yang menjadi pengguna BDT.

Tahap kedua adalah pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat melalui FKP. Tahapan ini bertujuan untuk mengonfirmasi keberadaan rumah tangga miskin dan rentan yang ada dalam daftar awal, menjangkau rumah tangga miskin lain yang belum terdaftar dan menandai *inclusion error*. FKP dilakukan dalam bentuk pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan yang dipandu oleh fasilitator (pendamping independen). Namun untuk wilayah padat penduduk, FKP dilakukan pada tingkat dusun atau Rukun Warga (RW).

Tahap ketiga adalah pencacahan langsung di tingkat rumah tangga yang dilakukan secara *door-to-door*. Pencacahan dilakukan oleh petugas lokal yang terlatih, untuk memutakhirkan informasi terkait dengan kondisi rumah, status sosial-ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset, dan kepesertaan program.

Tahap terakhir adalah pemeringkatan rumah tangga hasil pencacahan. Kegiatan utama dalam tahap ini adalah pemeringkatan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan PMT. Pendekatan ini semakin populer digunakan di banyak negara.

Selain data yang diperoleh dari proses sebelumnya, input utama lain yang digunakan dalam pemodelan PMT adalah SUSENAS 2011–2014 dan PODES 2014. Data yang diolah mengacu pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan demografi dan sosial-ekonomi penduduk dan rumah tangga yang memiliki kesesuaian antara SUSENAS dan hasil pendataan PBDT 2015.

Bab selanjutnya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tahapan yang dilakukan dalam pemutakhiran data yang menghasilkan BDT 2015, antara lain mengenai pentingnya penyusunan daftar awal yang digunakan, rincian pelaksanaan FKP, proses pendataan melalui pencacahan langsung, serta penerapan metode PMT dalam pemeringkatan status sosial ekonomi.

*Empat tahap
Pemutakhiran
BDT merupakan
serangkaian
kegiatan yang tidak
terpisahkan*





2

Pentingnya Daftar Awal Rumah Tangga





Pentingnya Daftar Awal Rumah Tangga

Daftar awal rumah tangga sasaran, memegang peran penting dalam berbagai kegiatan pendataan baik yang berbentuk survei maupun sensus. Daftar awal perlu dijaga agar tetap berkesinambungan dengan survei sebelumnya sehingga dapat berfungsi untuk memberikan arah. Selain itu, penggunaan data dari survei sebelumnya akan lebih menghemat waktu dan biaya karena tidak memulai dari nol.

Daftar awal PBDT 2015 adalah data PPLS 2011, yang berasal dari SENSUS 2010. Data ini mencakup 40% rumah tangga dengan kondisi sosial-ekonomi terendah secara nasional. Jumlah ini tidak hanya mencakup rumah tangga miskin tetapi juga rumah tangga yang tergolong miskin.

Daftar awal PBDT 2015 juga ditambah beberapa data program perlindungan sosial yang sudah dijalankan. Dengan demikian, BDT 2015 sudah mengakomodasi dan mengakumulasi seluruh data rumah tangga miskin di Indonesia yang pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan daftar awal tersebut, petugas pencacah melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Sesuai juklak pendataan rumah tangga miskin di Indonesia, petugas pencacah tidak diperkenankan mengurangi jumlah rumah tangga dalam daftar awal. Mereka justru diberi kesempatan untuk melakukan penambahan rumah tangga berdasarkan metode *sweeping survey* yang telah ditetapkan.

Aturan pendataan dalam juklak tersebut dibuat untuk menghindari terjadinya *under quota* (kekurang-cakupan) pada setiap kegiatan pendataan. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, pendataan rumah tangga miskin di Indonesia menggunakan pendekatan tersebut.

2.1. Daftar Awal dan Kesenambungan Data

Di Indonesia, daftar awal yang digunakan dalam beberapa kali pendataan rumah tangga miskin dari waktu ke waktu, menggunakan sumber yang berbeda-beda. PSE 2005 yang merupakan awal mula pendataan rumah tangga miskin dalam skala cukup besar, hanya menggunakan kuota untuk masing-masing desa/kelurahan. Pada tahun tersebut *listing* rumah tangga dilakukan di lapangan sebelum proses pendataan. Jumlahnya mengacu pada kuota yang dihasilkan dari persentase estimasi SUSENAS.

Selanjutnya pada Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP)

2006 dan 2007, daftar awal rumah tangga yang digunakan adalah hasil pendataan PSE 2005. Pada pelaksanaan SPDKP ini metode *sweeping survey* diterapkan untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk mengakomodasi rumah tangga miskin yang belum terdaftar. Berikutnya, pelaksanaan PPLS 2008, menggunakan daftar awal hasil PSE 2005 dan SPDKP 2007. Inovasi dalam penentuan sasaran pendataan, baru dilakukan pada PPLS 2011, yakni menggunakan daftar awal hasil sensus penduduk 2010 didukung dengan metode *sweeping survey* serta pendekatan konsultasi dengan rumah tangga miskin yang berdekatan.

Tabel 1. Sumber Daftar Awal Sasaran Pendataan Rumah Tangga Miskin, 2005-2011

Pendataan	Sumber Daftar Awal
Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005	Menggunakan sistem kuota per desa/ kelurahan
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007	PSE 2005
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008	PSE 2005 serta SPDKP 2006 dan 2007
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011	Sensus Penduduk 2010

Sumber: TNP2K, 2015

Walaupun penyempurnaan dan perbaikan daftar awal sasaran rumah tangga miskin telah dilakukan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa keluhan. Pertama, daftar awal yang digunakan belum sepenuhnya mengakomodasi pendataan sebelumnya, terutama pada pelaksanaan PPLS 2011. Kedua, masih ditemukan penerima manfaat program yang tidak tercakup dalam proses pendataan. Ketiga, terdapat perbedaan antara data awal rumah tangga miskin dari pemerintah pusat dengan data yang ada di pemerintah daerah.

2.2. Input Utama Daftar Awal Pemutakhiran BDT 2015

PBDT 2015 sepenuhnya mengakomodasi berbagai data rumah tangga sasaran dari periode sebelumnya, untuk mempertahankan konsistensi data rumah tangga miskin. Daftar awal yang digunakan disusun dari tiga sumber. Pertama adalah PPLS 2011 yang merunut hasil pendataan sejak dari pelaksanaan PSE 2005. Kedua adalah daftar rumah tangga penerima manfaat program berikut pemutakhirannya, yang tidak tercakup dalam proses pendataan. Ketiga adalah data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah yang berbeda dengan data dari pemerintah pusat.

BDT 2015 menjaga konsistensi data dengan mengakomodasi data hasil PPLS 2011, pemutakhiran kepesertaan program dan pemutakhiran oleh Pemerintah Daerah



Agar bisa menjadi bagian dari daftar awal, PBDT 2015 menetapkan persyaratan khusus. Data yang berasal dari tiga sumber tersebut harus memiliki kesetaraan kategori informasi yang setidaknya terdiri dari nama dan alamat, baik individu maupun rumah tangga. Persyaratan ini sangat penting karena pada proses selanjutnya, daftar awal menjadi input utama dalam pelaksanaan konsultasi publik (FKP) yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan. Verifikasi dalam forum tersebut hanya bisa dilakukan jika datanya mencakup nama dan alamat yang jelas.

Tabel 2 Sumber Daftar Awal Rumah Tangga dalam PBDT 2015

Sumber	Jumlah	Persentase	Satuan
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011	25.200.959	92,71	Rumah Tangga
Perubahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	347.362	1,28	Anggota Rumah Tangga
Formulir Rekapitulasi Pengganti Raskin	160.114	0,59	Rumah Tangga
Kepesertaan Program Keluarga Harapan	943.618	3,47	Rumah Tangga
Formulir Rekapitulasi Pengganti Kartu Perlindungan Sosial	418.538	1,54	Rumah Tangga
Usulan Daerah Pemerintah Daerah	112.254	0,41	Rumah Tangga
Jumlah Total	28.031.885		

Sumber: Laporan Ringkas Pelaksanaan PBDT, BPS

Setelah semua data digabungkan, jumlah keseluruhan rumah tangga yang akan diverifikasi keberadaannya adalah sebanyak 28.031.885 rumah tangga. Sekitar 92% dari jumlah tersebut, yakni 25.200.959 rumah tangga, berasal dari data hasil PPLS 2011. Sekitar 6% dari data tersebut merupakan data kepesertaan program berikut hasil pemutakhirannya, sedangkan sisanya (2%) merupakan daftar rumah tangga miskin yang dimiliki oleh daerah. Sebagai catatan, daftar awal rumah tangga ini bersifat komplementer, karena sebagian data kepesertaan program dan data yang bersumber dari pemerintah daerah memiliki kemungkinan sudah terdaftar dalam PPLS 2011.

3

Konsultasi Publik



Konsultasi Publik

Keberadaan BDT sampai sebelum proses pemutakhiran tahun 2015 mendapat beberapa kritik dan masukan dari berbagai kalangan terkait akurasi, reliabilitas, akuntabilitas dan transparansi. Mempertimbangkan berbagai saran tersebut, maka dilakukan inovasi dengan melibatkan komunitas dan pemerintah daerah dalam tahap penetapan daftar awal rumah tangga sasaran. Bentuknya adalah kegiatan dialog melalui FKP yang merupakan wadah untuk melakukan verifikasi terhadap data yang sudah ada serta menampung usulan rumah tangga miskin baru yang sebelumnya tidak tercantum. Prosesnya dilakukan secara terbuka dan hasilnya disepakati bersama.

Konsultasi Publik merupakan jawaban terhadap kritik dan saran berbagai kalangan terkait akurasi, keandalan, akuntabilitas dan transparansi Basis Data Terpadu.

3.1. Upaya Melibatkan Stakeholders

Kegiatan FKP ini melibatkan tokoh komunitas di setiap desa/kelurahan antara lain kepala dusun/ketua RW, tokoh agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Selain itu, pada wilayah tertentu yang tingkat kepadatan penduduknya relatif tinggi seperti wilayah perkotaan, FKP dilaksanakan pada Satuan Lingkungan Setempat (SLS) satu tingkat di bawah desa/kelurahan. Pada pelaksanaan FKP, peserta bersama-sama memeriksa keberadaan rumah tangga pada daftar awal, yang bersumber dari gabungan data PPLS 2011, data penerima program bantuan, data pemutakhiran kepesertaan program dan data dari pemerintah daerah.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperoleh daftar rumah tangga yang sudah diteliti dan disahkan oleh masyarakat melalui FKP. Daftar tersebut kemudian menjadi dasar pemutakhiran informasi karakteristik rumah tangga dan anggota rumah tangga sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, kegiatan FKP juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pada setiap kebijakan, program dan peraturan pemerintah.

3.2. Proses dan Pelaksanaan Lapangan

3.2.1. Partisipan FKP

Secara umum ada dua kelompok yang berpartisipasi dalam proses FKP untuk PBDT 2015. Pihak pertama adalah perwakilan BPS yang merupakan petugas

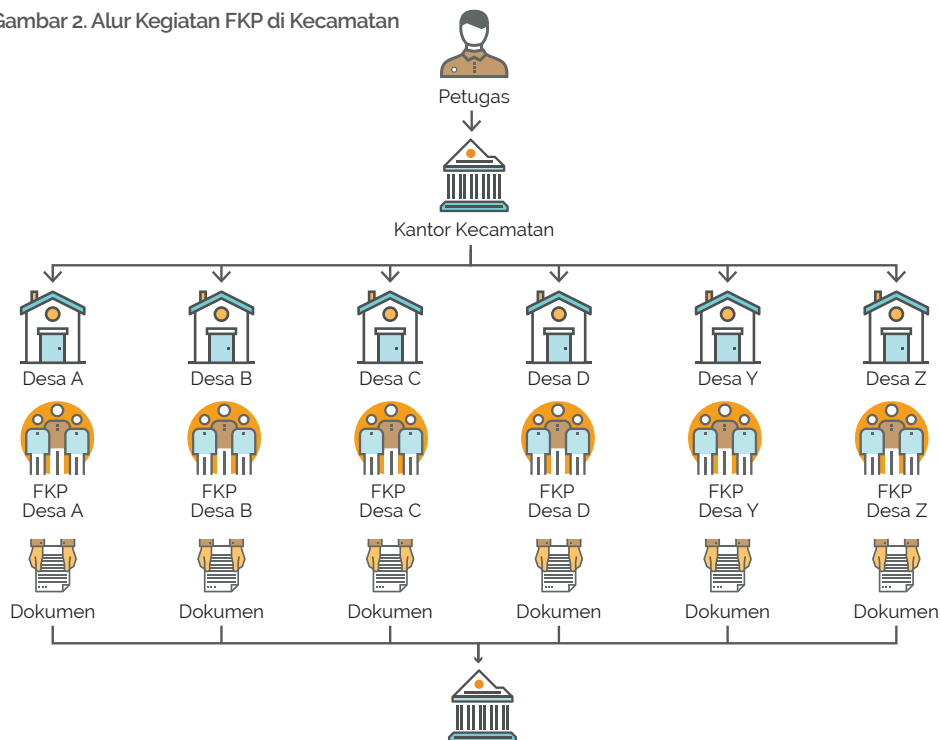
FKP. Tim ini terdiri dari seorang fasilitator dan seorang asisten fasilitator. Cakupan wilayah kerja fasilitator dan asisten fasilitator FKP adalah desa/kelurahan dalam satu kecamatan atau sesuai dengan penugasan dari BPS Kabupaten/Kota. Pihak kedua adalah peserta FKP yang terdiri dari tokoh komunitas seperti kepala dusun/RW, tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya yang dianggap mengenal kondisi sosial dan ekonomi warga disekitarnya.

Petugas FKP yang ditunjuk oleh BPS bertanggung jawab atas pelaksanaan FKP di wilayah kerjanya. Tugasnya antara lain merencanakan dan menyiapkan kegiatan FKP di seluruh kecamatan, berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah, serta menjelaskan dan membantu proses tata cara pemeriksaan daftar awal. Setelah FKP selesai dilaksanakan, petugas FKP membuat berita acara pelaksanaan dan memastikan dokumen FKP telah ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan semua peserta FKP.

3.2.2. Cakupan Wilayah dan Jadwal Pelaksanaan

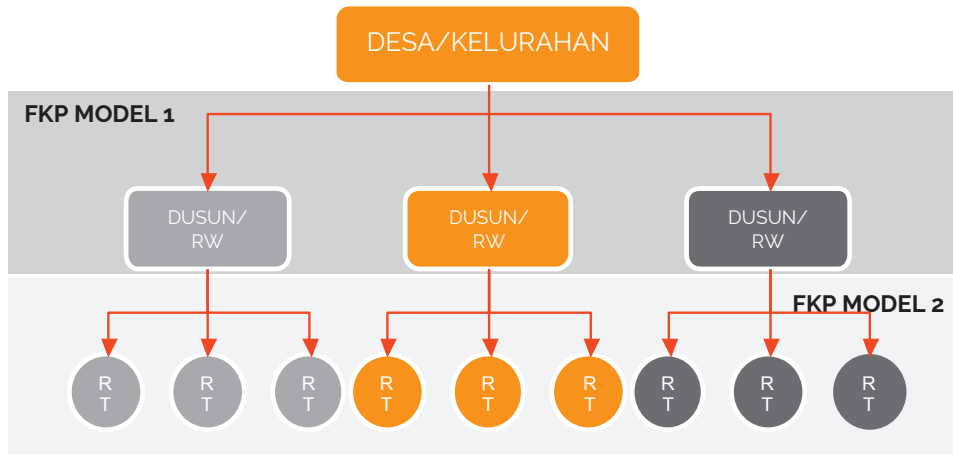
FKP dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 32 provinsi kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam pelaksanaannya, petugas datang ke satu kecamatan kemudian mendata semua desa atau kelurahan yang ada di wilayah administrasinya. Di setiap desa, petugas harus mendata jumlah dusun atau RW yang akan menjadi tempat pelaksanaan FKP. Hasil pendataan kemudian diserahkan ke kantor BPS Kabupaten/Kota yang kemudian dijadikan daftar tetap sasaran pendataan. Contoh dokumen dapat dilihat pada lampiran. Alur kegiatan FKP di tingkat kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur Kegiatan FKP di Kecamatan



Nama yang digunakan untuk SLS setingkat di bawah desa/kelurahan di Indonesia dapat berbeda-beda antar wilayah. Di beberapa wilayah tertentu, SLS setingkat di bawah desa/kelurahan adalah dusun atau RW. Untuk penyederhanaan, dalam penjelasan selanjutnya istilah dusun/RW akan digunakan untuk menyatakan SLS setingkat di bawah desa/kelurahan. Skema FKP yang dilaksanakan di desa/kelurahan dan di tingkat dusun/RW dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Struktur Model Pelaksanaan FKP



Sumber: Pedoman Forum Konsultasi Publik, BPS (2015)

Berdasarkan jadwal pelaksanaan yang disampaikan oleh BPS, tabel berikut menunjukkan rangkaian kegiatan pelaksanaan FKP.

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Pelatihan Fasilitator dan Asisten Fasilitator	18-27 Mei 2015
2	Pelaksanaan FKP	25 Mei-24 Juni 2015
3	Pengawasan Lapangan FKP	25 Mei-24 Juni 2015
4	Pengolahan Hasil FKP	1-30 Juni 2015

Sumber: Pedoman Forum Konsultasi Publik, BPS (2015)

Secara umum, FKP telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan juklak yang ditentukan. Namun, pergeseran jadwal pelaksanaan terjadi di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain waktu persiapan pemerintah desa/kelurahan, terbatasnya akses di wilayah-wilayah terpencil serta keterbatasan jumlah petugas lapangan.

3.2.3. Instrumen Pendukung

Jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan FKP PBDT 2015 meliputi Buku Pedoman Fasilitator dan Asisten Fasilitator serta tiga daftar isian. Pertama adalah **Daftar PBDT 2015 PPLS.**, berisi nama serta alamat rumah tangga yang bersumber dari PPLS 2011. Daftar ini harus diverifikasi kesesuaiannya dengan kondisi terkini Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Berikutnya adalah **Daftar PBDT 2015 Program**, berisi daftar RTS atau individu yang berasal dari data penerima beberapa program bantuan, antara lain: Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Orang Penderita Kecacatan (ODK). Daftar isian ketiga adalah **PBDT 2015 Lainnya** yang menjadi tanggung jawab asisten fasilitator digunakan untuk mendaftarkan rumah tangga tambahan jika diusulkan oleh peserta FKP.

Petugas juga dibekali dengan **Daftar Hadir** yang harus diisi dan ditandatangani oleh seluruh peserta FKP. Terakhir adalah **Lembar Berita Acara** berupa dokumen yang harus diisi oleh asisten fasilitator mengenai hasil pelaksanaan FKP. Tata cara pengisian semua dokumen mengacu pada buku *Pemutakhiran Basis Data Terpadu: Pedoman Konsultasi Publik*.

3.2.4. Target Output

Sesuai dengan tujuan FKP, beberapa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan forum ini adalah daftar awal rumah tangga yang telah diverifikasi, yakni **Daftar PBDT 2015 PPLS** dan **Daftar PBDT 2015 Program**, dan daftar tambahan rumah tangga usulan yang dicantumkan dalam **Daftar PBDT 2015 Lainnya**.

Ketiga dokumen tersebut selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala desa/lurah setempat, melalui berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak. Gabungan semua daftar ini kemudian menjadi daftar tetap rumah tangga sasaran pendataan BDT 2015. Contoh dokumen hasil pelaksanaan FKP dapat dilihat pada lampiran.

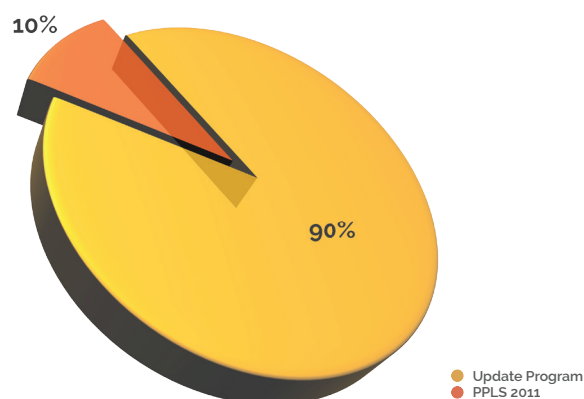
3.3. Hasil Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP melibatkan sumber daya yang relatif besar. FKP telah dilaksanakan di 96.133 lokasi yang tersebar di 75.752 desa, 6.370 kecamatan serta 457 kabupaten/kota. Pelaksanaan FKP tersebut didukung oleh 7.505 pasang fasilitator dan asisten fasilitator yang merupakan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Sebaran wilayah pelaksanaan FKP dapat dilihat pada lampiran.



Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, 90% (25.200.959 rumah tangga) dari sumber data *pre-list* BDT 2015 berasal dari PPLS 2011 ditambah dengan 10% (2.830.926 rumah tangga) dari hasil pemutakhiran program dan pemutakhiran oleh daerah. Berdasarkan gabungan dua sumber data tersebut, selanjutnya konsultasi melalui FKP dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan semua rumah tangga yang ada dalam daftar.

Gambar 4. Komposisi Daftar Awal Rumah Tangga Sasaran Pendataan BDT 2015 (*Pre-list*)

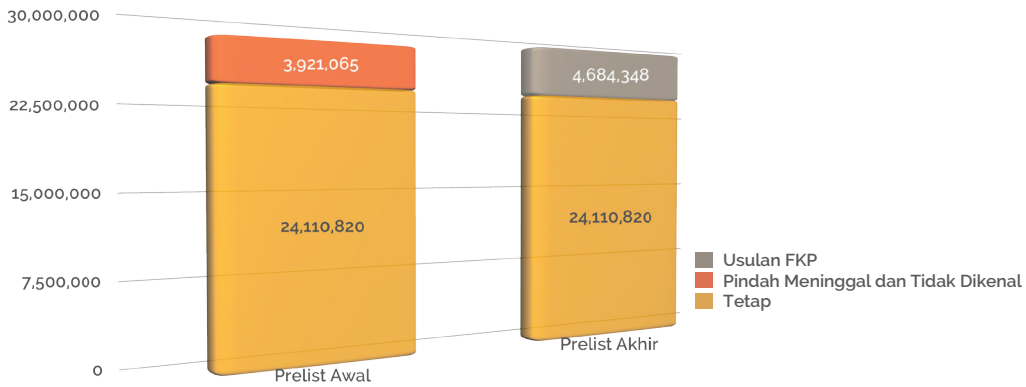


Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Secara umum hasil pelaksanaan FKP sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemutakhiran BDT 2015. Pertama, FKP menjadi media untuk menjangkau rumah tangga miskin. Hasil FKP menunjukkan adanya usulan penambahan rumah tangga miskin yang belum terdapat dalam daftar awal yang berjumlah 4,6 juta atau sekitar 16% dari seluruh hasil pendataan. Kedua, FKP menjadi media untuk verifikasi keberadaan rumah tangga.

Hasil FKP menemukan 86% rumah tangga yang ada dalam Daftar Awal Rumah Tangga masih tetap berdomisili di alamat yang sama. Angka tersebut setara dengan 24 juta rumah tangga. Hasil FKP juga menunjukkan bahwa 91% rumah tangga yang terdata pada PPLS 2011 dapat diidentifikasi keberadaannya dan masih berada di lokasi yang sama. Di sisi lain, terkait data yang berasal dari berbagai program, FKP hanya berhasil melakukan verifikasi 31% rumah tangga yang masih ada di wilayah yang sama. Rendahnya hasil verifikasi pada data yang bersumber dari program disebabkan oleh adanya rumah tangga yang tercatat ganda dalam data PPLS 2011. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.

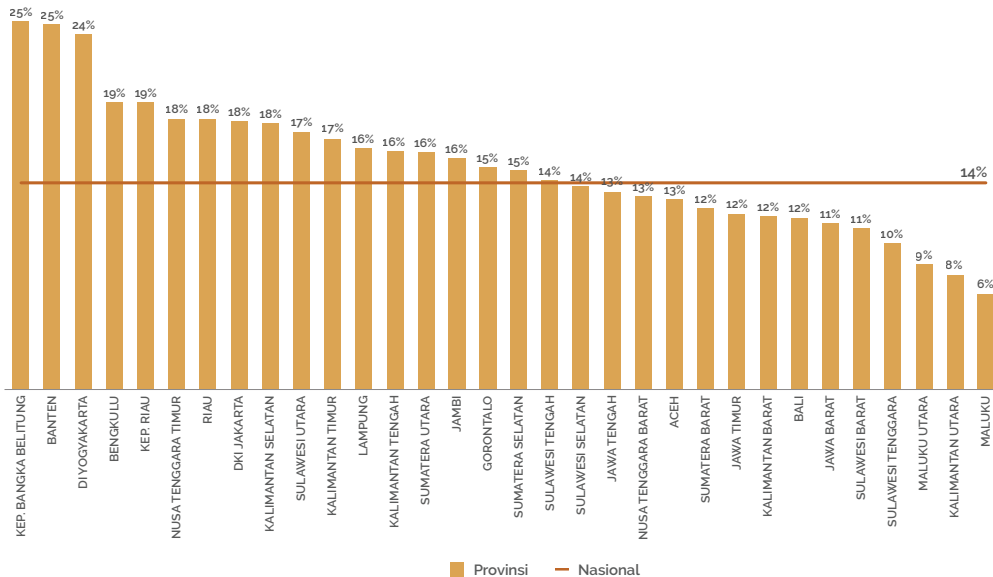
Gambar 5. Ringkasan Hasil Pelaksanaan FKP Berdasarkan *Pre-list* Awal dan Akhir Rumah Tangga Sasaran



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Terdapat sekitar 14% rumah tangga dalam *pre-list* awal yang tidak teridentifikasi saat pelaksanaan FKP, atau setara dengan 3,9 juta rumah tangga. Hasil tersebut merepresentasikan kombinasi antara rumah tangga yang pindah tempat tinggal, meninggal dunia dan tidak dikenal oleh warga setempat. Gambar 6 menunjukkan presentase rumah tangga dalam *pre-list* awal yang tidak teridentifikasi saat FKP, tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Belitung (25%) dan terendah berada di Provinsi Maluku (6%).

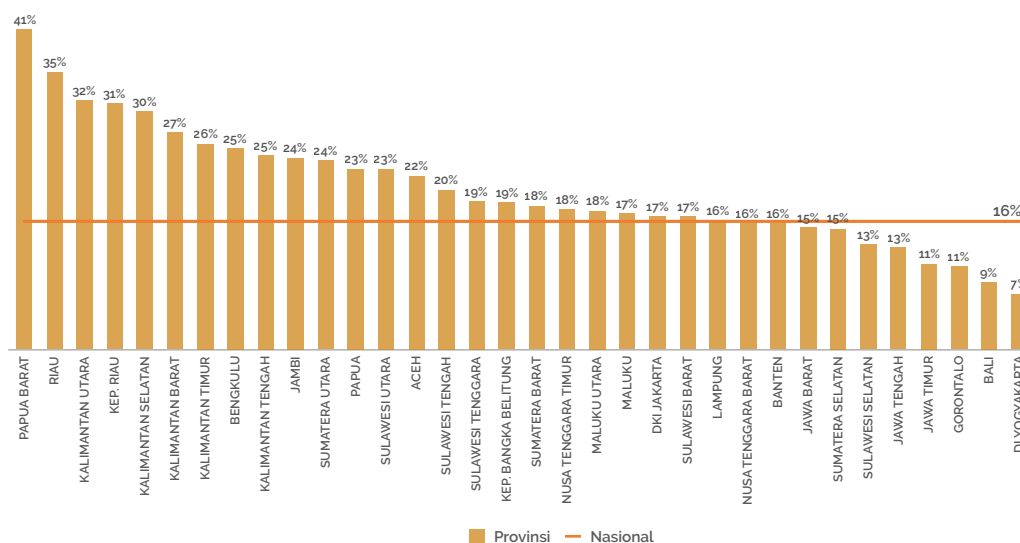
Gambar 6. Presentase Rumah Tangga Pindah Meninggal dan Tidak Dikenal terhadap *Pre-list* Awal Berdasarkan Hasil FKP



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Selain verifikasi status dan keberadaan rumah tangga, sesuai dengan tujuan awal FKP juga merupakan media untuk menjangkau rumah tangga miskin dan rentan yang belum terdapat dalam BDT. Berdasarkan data lapangan, pelaksanaan FKP menunjukkan bahwa secara umum terjadi penjangkauan rumah tangga miskin dan rentan. Jumlah rumah tangga baru yang belum tercantum pada daftar sebelumnya adalah sekitar 16% dari seluruh rumah tangga pada *pre-list* akhir hasil FKP. Penjangkauan rumah tangga miskin dan rentan melalui FKP yang tertinggi terjadi di Provinsi Riau dengan penambahan sebesar 35%, sedangkan penambahan terkecil terdapat di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 7%. Untuk Papua dan Papua Barat, penjangkauan rumah tangga dilakukan melalui *ground check* sebagai pengganti FKP.

Gambar 7. Presentase Penjangkauan Rumah Tangga Miskin dan Rentan terhadap *Pre-list* Akhir berdasarkan Hasil FKP



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)


Hasil FKP yang merupakan *pre-list final* merupakan *input* utama pelaksanaan pendataan lapangan yang dilakukan dari rumah ke rumah. Berdasarkan hasil FKP tersebut, pelaksanaan pendataan yang dilakukan dalam PBDT 2015 berusaha menjangkau sekitar 28.795.168 rumah tangga. Informasi mengenai rincian sebaran rumah tangga di masing-masing wilayah dapat dilihat pada lampiran.

4

Pendataan Rumah Tangga



Pendataan Rumah Tangga



Pendataan rumah tangga miskin adalah tahap kedua dalam PBDT 2015, setelah proses verifikasi melalui FKP selesai dilaksanakan. Petugas membawa daftar yang sudah memperoleh pengesahan dari kepala desa/lurah dan camat untuk dilengkapi datanya. Kegiatan pendataan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 34 provinsi, 511 kabupaten/kota, 7.074 kecamatan dan 82.190 desa/kelurahan. Target rumah tangga yang datanya harus dikumpulkan adalah sekitar 40% dari seluruh jumlah rumah tangga nasional dengan kondisi sosial ekonomi terbawah.

Proses pendataan mencakup verifikasi identitas dan tempat tinggal sesuai dengan perkembangan terkini, pencatatan karakteristik sosial-ekonomi yang mungkin sudah mengalami perubahan, serta pengumpulan karakteristik rumah tangga yang sebelumnya belum terdata. Proses pengumpulan informasi ini tidak hanya dilakukan pada tingkat rumah tangga, tetapi juga pada tingkat tokoh masyarakat di tingkat wilayah SLS.

4.1. Metodologi dan Cakupan

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan menggunakan kuesioner dan tabel isian terstruktur. Daftar pertanyaan tersedia pada lampiran 'Contoh Dokumen Kuesioner Rumah Tangga PBDT2015. RT'. Informasi yang dikumpulkan bersifat umum sehingga dapat disimpulkan melalui pengamatan dan digali melalui wawancara. Tidak ada penggalian informasi yang memerlukan pengujian laboratorium, atau pembuktian legal formal. Oleh karena itu, kebenaran informasi yang digali akan sangat tergantung pada kejujuran rumah tangga dalam menjawab pertanyaan, kejelian tokoh masyarakat dalam mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya, dan kemampuan petugas dalam menggali keterangan.

4.1.1. Satuan Wilayah Kerja

Satuan pengamatan dalam PBDT 2015 adalah SLS terkecil, yakni wilayah pemukiman yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan yang secara sah diakui oleh pemerintahan desa/kelurahan. Sebagai bagian wilayah di bawah desa/kelurahan, SLS dapat diidentifikasi secara berjenjang dan mempunyai struktur organisasi untuk mengakomodasi kebutuhan warganya. SLS dapat berbentuk RT, RW/RK, kampung, dusun, lorong, jorong atau lainnya sesuai dengan nama di masing-masing daerah.

4.1.2. Data yang Dikumpulkan

Dalam pelaksanaan PBDT 2015, data yang dikumpulkan dari rumah tangga terdiri dari empat kelompok penting, yaitu:

1. Nama dan alamat kepala rumah tangga.

Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga *by name by address*, yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

2. Keterangan perumahan

Informasi yang dikumpulkan mencakup status penguasaan bangunan, penguasaan lahan, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja dan jumlah kamar tidur.

3. Keterangan sosial-ekonomi anggota rumah tangga (ART)

Informasi yang termasuk kelompok ini antara lain: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jumlah keluarga dalam satu rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.

4. Keterangan kepemilikan aset dan keikutsertaan program

Informasi yang dikumpulkan mencakup kepemilikan aset, usaha mikro yang dimiliki, dan keikutsertaan dalam berbagai program perlindungan sosial.

4.1.3. Dokumen yang Digunakan

Saat pendataan, Petugas Pencacah Lapangan (PCL) menggunakan dua jenis dokumen. Pertama adalah **Daftar PBDT2015.FKP** yang berisi nama dan alamat rumah tangga hasil FKP di setiap SLS untuk diverifikasi. Dokumen kedua adalah **Daftar PBDT2015.RT**, yaitu kuesioner untuk mencatat data setiap rumah tangga sasaran yang telah diverifikasi. Petunjuk tata cara pengisian dua daftar tersebut ada dalam **Pedoman Pencacah**. Keduanya dapat dilihat pada bagian lampiran.



4.1.4. Mekanisme Pendataan

Sebelum pendataan dimulai, petugas memberitahu Kepala Desa/Lurah dan ketua SLS dengan membawa surat tugas dan tanda pengenal, serta menjelaskan bahwa Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 adalah tindak lanjut dari hasil FKP sebelumnya di wilayah terkait. Setelah itu, petugas mengunjungi semua rumah tangga yang ada dalam daftar. Sebagai bagian dari pemantauan dan pengendalian, setiap PCL selesai melakukan pendataan di satu SLS tertentu, PCL segera mengirimkan laporan jumlah RTS yang didata melalui SMS *gateway*.

4.1.5. Konfirmasi Rumah Tangga Miskin Tambahan

Rumah tangga tambahan pada **Daftar PBDT2015.FKP** yang muncul sebagai hasil FKP diberi tanda "#". Semua rumah tangga yang bertanda ini, harus dikonsultasikan kepada tiga rumah tangga miskin lain yang ada di sekitarnya. Tiga narasumber tersebut diutamakan yang ada dalam **Daftar PBDT2015.FKP** di SLS yang sama namun tidak bertanda "#".

Jika jumlah rumah tangga lain pada **Daftar PBDT2015.FKP** kurang dari tiga atau tidak ada sama sekali, kekurangan bisa dipilih dari rumah tangga yang tidak terdapat dalam daftar. Konsultasi dengan ketiga narasumber diutamakan untuk dilakukan secara bersama-sama. Syarat yang paling penting adalah narasumber tidak boleh berstatus sebagai PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD.

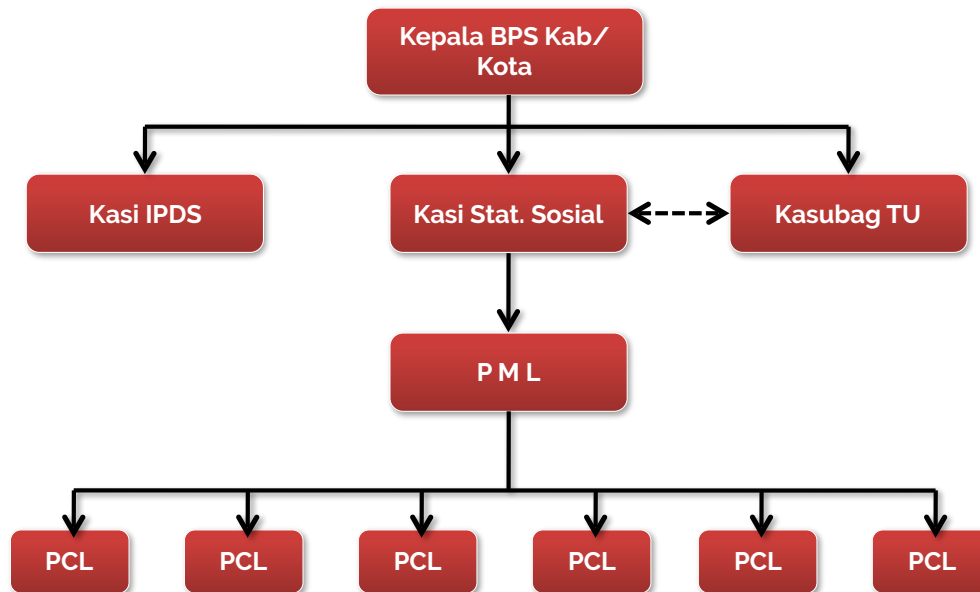
Hasil konsultasi harus dicatat dengan menunjukkan jumlah narasumber yang mengkonfirmasi kondisi rumah tangga bertanda #, kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh narasumber. Sebagai contoh, jika tidak ada di antara tiga narasumber yang mengatakan kondisinya sama/kurang, maka ditulis (0/3). Jika ada satu di antara ketiga narasumber yang mengatakan kondisinya sama/kurang, maka ditulis (1/3). Demikian seterusnya.

Selanjutnya, kepada ketiga narasumber ditanya: "Apakah ada lagi rumah tangga miskin yang kondisi ekonominya lebih buruk, yang belum tercatat?". Apabila ada rumah tangga yang memenuhi kondisi tersebut, maka dicatat pada baris setelah terakhir dalam **Daftar PBDT2015.FKP**. Setelah itu, rumah tangga miskin tersebut didata menggunakan **Daftar PBDT2015.RT** dan dilaporkan kepada Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).

4.2. Pengorganisasian Kegiatan Pencacahan di Lapangan

Untuk menjamin penyelesaian pendataan yang mencakup wilayah dan jumlah rumah tangga yang begitu besar, dibutuhkan organisasi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Pengorganisasian di tiap tingkatan ini merupakan mata rantai yang tidak terputus, yang berfungsi untuk mencatat dan merekam informasi mengenai kegiatan pencacahan di lapangan.

Gambar 8. Organisasi lapangan PBDT 2015 di daerah



Sumber: Pedoman Penacacahan Lapangan, Buku 3

4.3. Pengawasan Kualitas Pendataan

Sebagaimana pendataan sebelumnya, PBDT yang dilaksanakan pada tahun 2015 memiliki cakupan wilayah nasional dengan jumlah rumah tangga sasaran pendataan yang relatif besar. Kompleksitas muncul dari berbagai aspek, antara lain terkait tata kelola, instrumen lapangan dan pelaksanaan pengumpulan data. Pada saat yang sama, penyajian hasil pendataan dengan kualitas yang tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, model pengawasan dalam bentuk supervisi dan sistem *monitoring* untuk menjaga kualitas pada setiap tahapan menjadi kebutuhan mutlak.

Supervisi dilakukan untuk memonitor pelaksanaan, mulai dari pelatihan Instruktur Daerah (INDA) sampai dengan pelatihan tim pengolahan data. Seluruh petugas supervisi berasal dari BPS di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka supervisi antara lain: pelatihan INDA, pelatihan petugas lapangan FKP dan pendataan, termasuk pengawasan saat pelaksanaan pendataan, pengolahan/entri dokumen, *monitoring* kualitas, dan verifikasi. Melalui supervisi dapat segera diketahui jika terjadi penyimpangan dan permasalahan terhadap prosedur selama masa pencacahan.

Proses pendataan PBDT 2015 dilengkapi dengan sistem *monitoring* yang dilakukan secara *online*. Tim pelaksana PBDT di Jakarta mendapatkan *update* secara reguler mengenai pencapaian jumlah rumah tangga yang berhasil didata. Melalui mekanisme ini, jika ada tim daerah yang menemukan kesulitan dalam mencapai target rumah tangga yang harus didata, tim inti dari pusat dapat memberikan tanggapan dan rekomendasi langsung. Tim utama untuk kegiatan *monitoring* dan pelaksanaan lapangan terdiri dari pimpinan bidang statistik sosial di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan pusat.

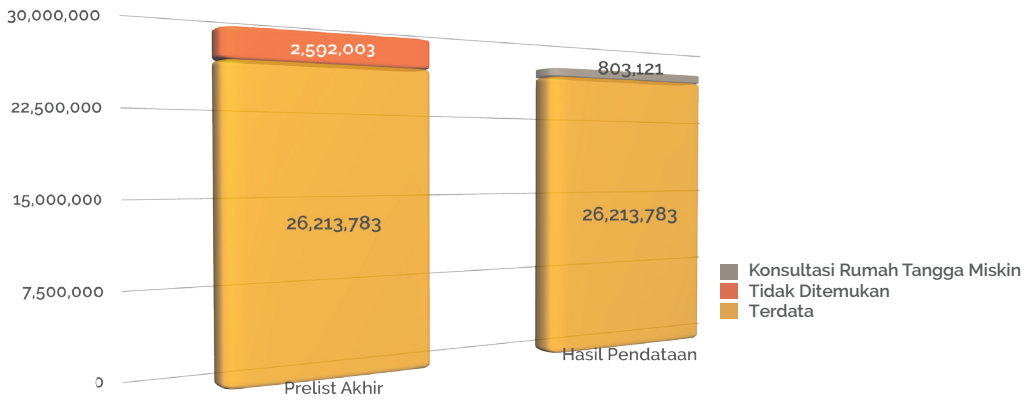
Pelaksanaan PBDT juga dilengkapi dengan sistem *monitoring* berbasis *short message service* (SMS) yang dirancang untuk memudahkan pemantau, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Adanya sistem *monitoring* ini, memungkinkan para pemantau melihat perolehan data yang telah dikirimkan oleh petugas melalui SMS. Jenis informasi yang dipantau dan dievaluasi antara lain: jumlah kuota sasaran yang tercapai, jumlah rumah tangga meninggal tanpa ART lain, jumlah rumah tangga yang pindah, dan jumlah rumah tangga yang tidak ditemukan, serta jumlah rumah tangga tambahan hasil *sweeping*.

4.4. Gambaran Umum Hasil Pendataan

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, FKP menghasilkan *pre-list* akhir sejumlah 28.805.786 rumah tangga yang kemudian digunakan untuk pendataan. Sekitar 8,9% dari jumlah tersebut tidak dapat ditemukan pada saat verifikasi/pendataan. Angka tersebut setara dengan 2,5 juta rumah tangga. Hasil pendataan mencakup 27 juta rumah tangga, yang terdiri dari 26,2 juta rumah tangga berasal dari *pre-list* akhir (97,03%) dan sisanya adalah sekitar 803 ribu rumah tangga berasal dari *sweeping* (2,9%).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pendataan rumah tangga berjalan dengan lancar, sesuai dengan target dan SOP yang telah dirumuskan sebelumnya.

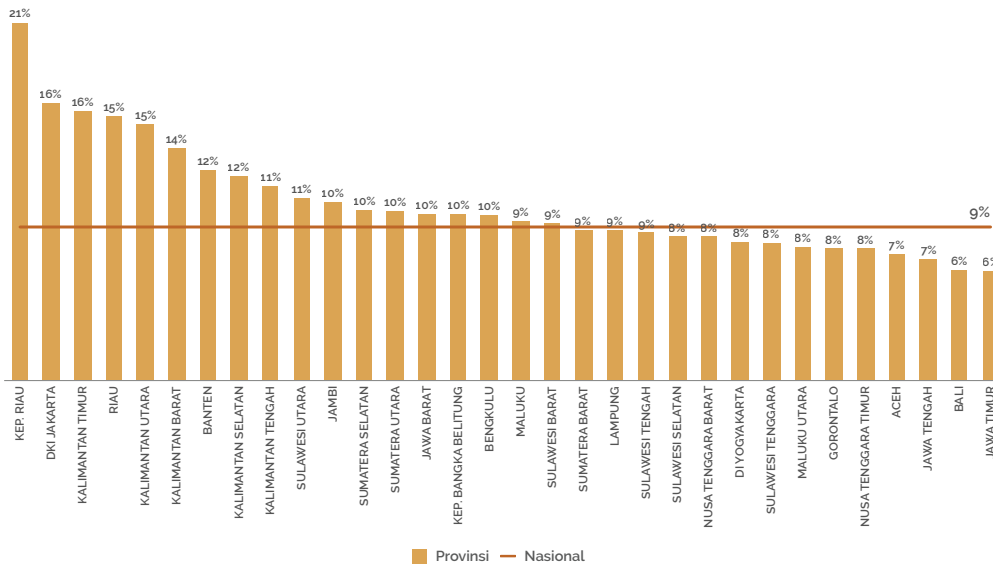
Gambar 9. Ringkasan Hasil Pendataan Berdasarkan Pre-list Awal dan Hasil Pendataan



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sekitar 9% rumah tangga tidak dapat ditemukan. Gambar berikut menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan proporsi tertinggi, yaitu sekitar 20%, untuk jumlah rumah tangga yang tidak dapat ditemukan. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan proporsi yang relatif rendah, yaitu sekitar 6,4%.

Gambar 10. Presentase Rumah Tangga dalam Pre-list Akhir yang Tidak Ditemukan Saat Proses Pendataan

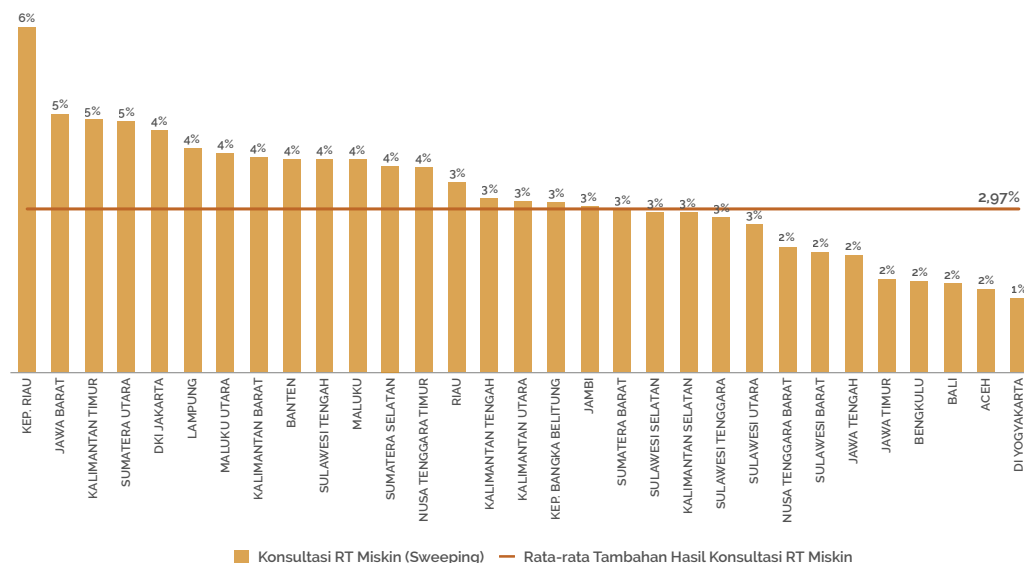


Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)



Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, konsultasi dengan rumah tangga miskin ditujukan untuk menyisir rumah tangga miskin yang belum tercakup melalui FKP. Hasilnya adalah secara nasional terdapat penambahan sekitar 800 ribu rumah tangga miskin. Wilayah dengan penambahan rumah tangga miskin tertinggi adalah Provinsi Riau, yaitu sekitar 6,3%, sedangkan wilayah dengan penambahan terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sekitar 1,3%.

Gambar 11. Presentase Rumah Tangga Hasil Pendataan Berdasarkan Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Proses pendataan rumah tangga miskin dalam pemutakhiran BDT mencakup 27.016.904 rumah tangga. Angka tersebut merupakan jumlah rumah tangga dalam *pre-list* pendataan hasil FKP berikut tambahan dari lapangan, hasil konsultasi dengan rumah tangga miskin (*sweeping*). Setelah proses pendataan selesai, dilakukan penerapan *negative list*, yakni pengurangan rumah tangga yang memiliki anggota keluarga berstatus PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN dan karyawan BUMD. Hasilnya terdapat 24.653 rumah tangga yang masuk kategori *negative list* (0,09%).

Selain itu, pendataan juga menghasilkan daftar rumah tangga hasil FKP yang dinyatakan tidak masuk kategori miskin. Jumlahnya mencapai 1.240.895 rumah tangga atau setara dengan 5%. Dengan demikian, pemutakhiran BDT yang dilakukan pada tahun 2015 menghasilkan daftar final yang berisi 25.751.356 rumah tangga miskin atau setara dengan 95% dari jumlah awal rumah tangga sasaran (lihat Gambar 12).

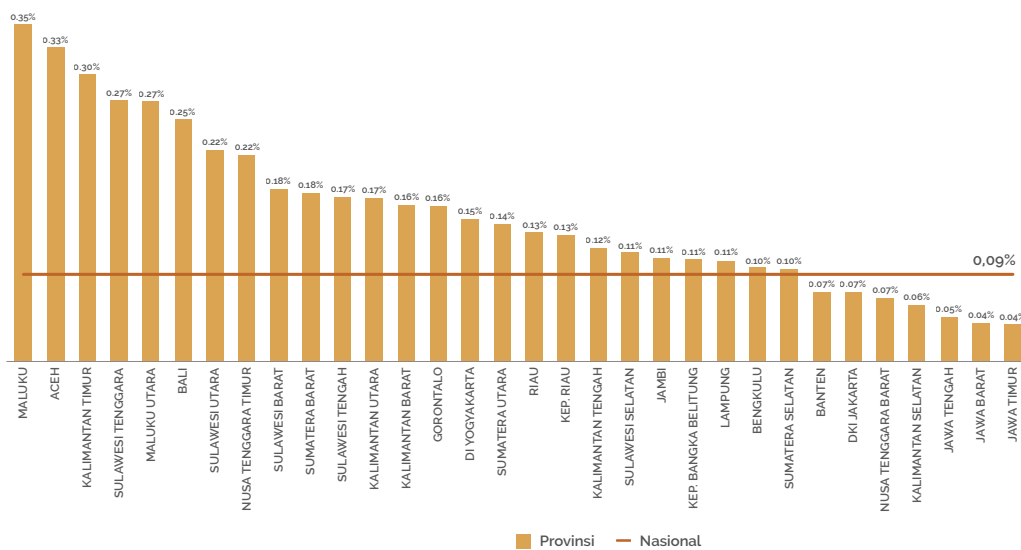
Gambar 12. Ringkasan Hasil Pendataan Rumah Tangga



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Gambar 13 menunjukkan presentase rumah tangga dengan ART yang masuk ke dalam daftar negatif terhadap total hasil pendataan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Maluku merupakan wilayah dengan daftar negatif tertinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yakni sebesar 0,35%. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan daftar negatif terendah, yaitu sebesar 0,04%.

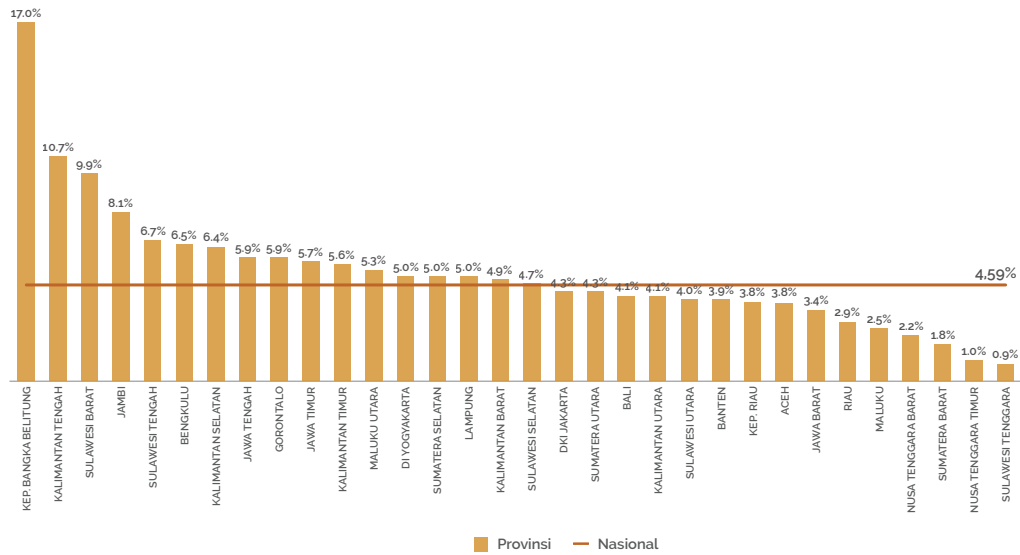
Gambar 13. Presentase Rumah Tangga dengan ART dalam Daftar Negatif Terhadap Total Hasil Pendataan



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

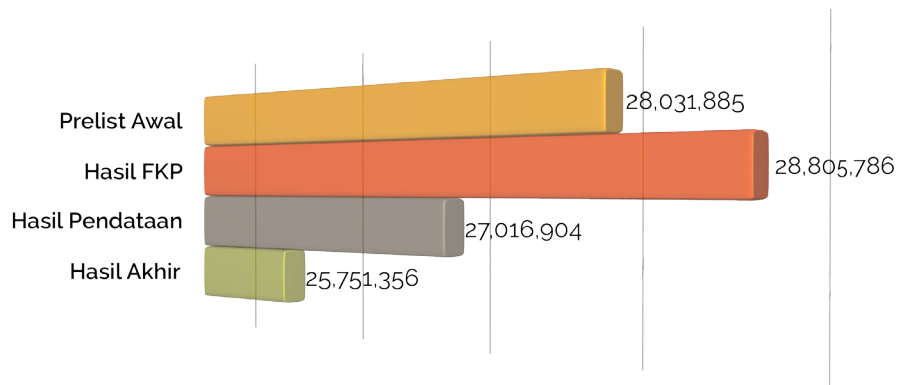
Pendataan juga menemukan rumah tangga hasil FKP yang dinyatakan tidak layak masuk daftar rumah tangga miskin, yakni sebesar 4,59% dari seluruh hasil pendataan atau sejumlah 1.240.895 rumah tangga. Dalam aspek ini, Provinsi Bangka Belitung merupakan wilayah dengan angka tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu sekitar 17,04%, sedangkan wilayah dengan angka paling kecil adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni hanya sekitar 0,85%.

Gambar 14. Presentase Rumah Tangga yang Dinyatakan Tidak Layak Berdasarkan FKP Terhadap Total Hasil Pendataan



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Gambar 15. Ringkasan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Hasil akhir pendataan dalam pemutakhiran BDT tersusun setelah melewati beberapa tahapan. Tahap pertama adalah *pre-list* awal yang terdiri dari 28.031.885 rumah tangga. Daftar tersebut merupakan input utama pelaksanaan FKP. Pada tahap kedua, setelah FKP diselenggarakan, dihasilkan sejumlah 28.805.786 rumah tangga yang merupakan input utama pelaksanaan pendataan. Pada tahap ketiga, dihasilkan 27.016.904 rumah tangga yang terdata menggunakan kuesioner yang telah disediakan. Pada tahap terakhir dihasilkan sejumlah 25.751.356 rumah tangga miskin, dengan mengeluarkan rumah tangga yang masuk kategori *negative list* dan rumah tangga dari daftar FKP yang dinyatakan tidak masuk kategori miskin. Hasil akhir ini merupakan daftar final rumah tangga miskin yang menjadi bagian dari BDT setelah melalui proses pemutakhiran pada tahun 2015.

4.5. Perlakuan Khusus: Pendataan Papua dan Papua Barat

Pelaksanaan PBDT 2015 di wilayah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) menggunakan mekanisme yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Seperti pada pelaksanaan PPLS 2011, pelaksanaan PBDT di wilayah ini dilaksanakan dengan metode *negative list*, yaitu mengeluarkan rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga mampu. Mekanisme ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti: kondisi geografis, keterbatasan sarana transportasi yang ada, tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pendataan, serta keterbatasan waktu.

4.5.1. Metode yang digunakan

PBDT 2015 di wilayah Papua dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari Administrasi Kependudukan (Adminduk). Data tersebut dipilih dengan pertimbangan:

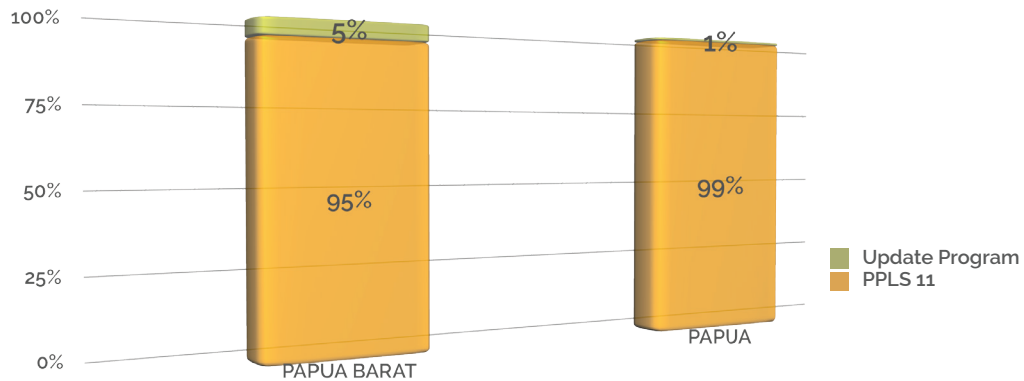
1. Semua penduduk Indonesia mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Kartu Keluarga (KK) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keluarga;
2. Terdapat informasi jenis pekerjaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga mampu;
3. Data Adminduk telah dimutakhirkan menjelang Pemilu 2014.

Pemeriksaan validitas data dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari sumber data lainnya, misalnya daftar nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), daftar nama anggota DPRD atau mantan anggota DPRD dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan sebagainya. Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi rumah tangga penerima bantuan program, proses PBDT 2015 di wilayah Papua mencakup nama-nama rumah tangga yang ada dalam PPLS 2011.

4.5.2. Deskripsi Singkat Hasil Pendataan Wilayah Papua

Sebagaimana daerah lainnya, pendataan di Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan sumber daftar awal yang bersumber dari PPLS 2011 dan hasil pemutakhiran kepesertaan program. *Pre-list* awal Provinsi Papua terdiri dari 449.811 rumah tangga, dengan sekitar 0.8% (3.654) diantaranya merupakan hasil pemutakhiran kepesertaan program. Di Provinsi Papua Barat, sekitar 5% (5.302) rumah tangga dalam *pre-list* awal merupakan rumah tangga hasil pemutakhiran kepesertaan program dengan total seluruh *pre-list* awal sebesar 98.171 rumah tangga.

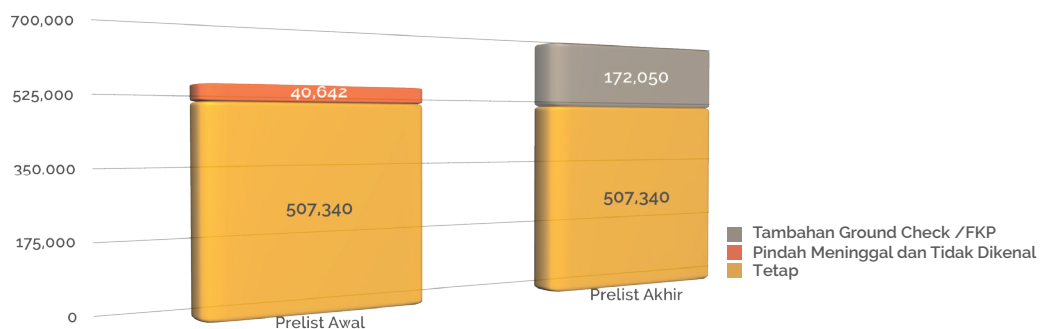
Gambar 16. *Pre-list* Awal Menurut Sumber Data yang Digunakan di Wilayah Papua



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Pelaksanaan *ground check* sebagai pengganti FKP berhasil menjangkau rumah tangga miskin dan rentan di wilayah Papua. Berdasarkan hasil tersebut, sekitar 8% rumah tangga dalam *pre-list* awal dinyatakan tidak dikenal, pindah atau meninggal. Angka tersebut setara dengan 40.642 rumah tangga pada *pre-list* awal. Pelaksanaan *ground check* berhasil menjangkau 33,91% rumah tangga miskin dan rentan. Persentase tersebut setara dengan 172.050 rumah tangga.

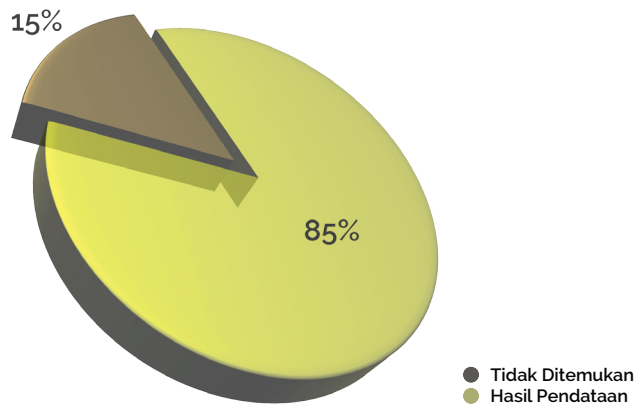
Gambar 17. Proporsi Rumah Tangga Pindah Meninggal dan Tidak Dikenal Terhadap Prelist Awal Berdasarkan Hasil *Ground Check* di Wilayah Papua



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Hasil pelaksanaan *ground checking* sebagai pengganti FKP di wilayah Papua menetapkan 679.390 rumah tangga sebagai *pre-list* akhir. Berdasarkan hasil tersebut, 85% dari *pre-list* akhir atau setara dengan 583.851 rumah tangga diantaranya tercakup dalam proses pendataan. Hasil tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mampu mencakup 94% rumah tangga dalam *pre-list* akhir.

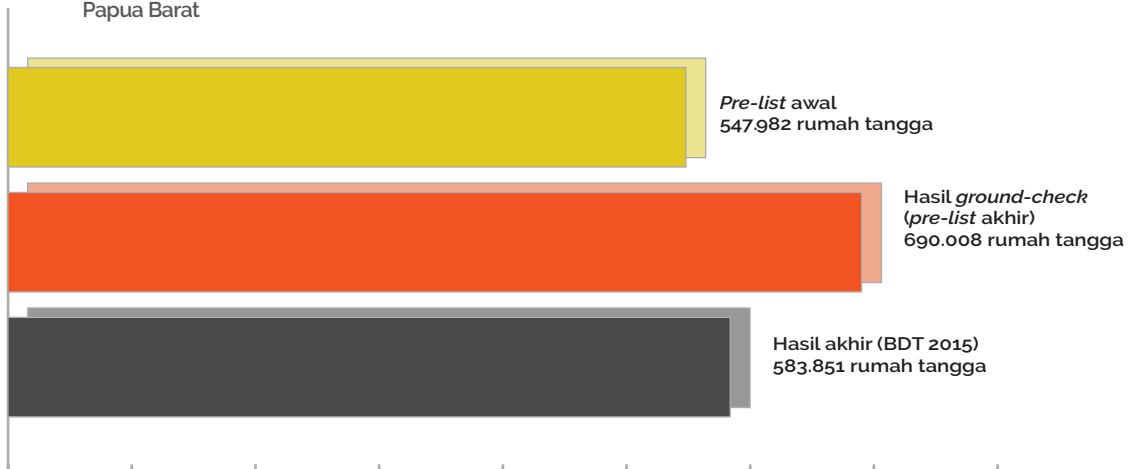
Gambar 18. Ringkasan Hasil Pendataan di Wilayah Papua



Sumber: Laporan Ringkas Pemutakhiran Basis Data Terpadu, BPS (2015)

Secara umum, dengan mempertimbangkan lokasi pendataan yang relatif tidak terjangkau, proses PBDT 2015 memberikan hasil yang cukup menggembirakan dibandingkan proses-proses serupa yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan *pre-list* awal yang berisi 547.982 rumah tangga, proses PBDT 2015 setidaknya berhasil menetapkan hingga 690.008 rumah tangga sebagai *pre-list* akhir. Dengan pertimbangan lokasi yang relatif sulit dan tidak terjangkau, pendataan yang menghasilkan sekitar 85% rumah tangga dari *pre-list* akhir setidaknya merupakan hasil yang cukup maksimal dalam proses PBDT 2015.

Gambar 19. Ringkasan Jumlah *Pre-list* Awal, *Pre-list* Akhir dan Hasil Pendataan Provinsi Papua dan Papua Barat





A photograph of a group of women in a community setting. In the foreground, a woman wearing a bright yellow headscarf looks towards the left. Behind her, several other women are visible, some wearing black headscarves with red accents. The background is slightly blurred, showing more people and colorful clothing. The overall atmosphere appears to be one of a community gathering or meeting.

5

Pemeringkatan Status Sosial Ekonomi

Pemeringkatan Status Sosial Ekonomi

Setelah kegiatan pengumpulan data PBDT 2015 selesai, tahap terakhir adalah membuat data yang ada dapat diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan/kesejahteraan yang pada umumnya diukur dari besaran pengeluaran bulanan rumah tangga. Namun, PBDT 2015 tidak mengumpulkan informasi ini karena kerumitan dan faktor biaya. Di sisi lain, SUSENAS memiliki informasi mengenai pengeluaran rumah tangga. Secara teoritis, dua set data ini setara mengingat keduanya mempunyai *overlapped variables* (sejumlah parameter yang definisinya sama) yakni data mengenai karakteristik sosial-ekonomi yang terkait dengan demografi dan kepemilikan rumah. Secara statistik, keduanya merupakan data yang bisa digunakan untuk merepresentasikan populasi Indonesia pada kelompok kesejahteraan terbawah.

Dengan dua alasan tersebut, maka tim statistik TNP2K melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Langkah pertama adalah mengeksplorasi data SUSENAS untuk melihat hubungan parameter sosial-ekonomi dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Dari langkah ini tim menemukan besaran koefisien pada setiap parameter yang berpengaruh terhadap besaran angka pengeluaran rumah tangga. Langkah kedua adalah menerapkan parameter dari langkah pertama pada kombinasi data karakteristik sosial-ekonomi pada PBDT 2015 untuk memunculkan angka proksi pengeluaran rumah tangga BDT. Dalam pelaksanaannya, perhitungan koefisien setiap parameter ini dilakukan dengan metode **Proxy Mean Testing (PMT)**, yaitu sebuah metode pendugaan dengan membuat model prediksi menggunakan teknik regresi.

Mengingat data SUSENAS mencakup luasan geografis seluruh Indonesia yang sangat beragam, maka **Indeks Kesulitan Geografis (IKG)** digunakan sebagai **faktor koreksi** wilayah. Indeks ini dihasilkan dari riset Potensi Desa (PODES) 2014 yang menggambarkan karakteristik wilayah di tingkat desa/kelurahan. IKG merupakan indeks komposit beberapa karakteristik wilayah yang mencakup akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kondisi infrastruktur dan akses transportasi. IKG juga digunakan sebagai input utama dalam mengalokasikan Dana Desa.

Perlu diungkapkan bahwa TNP2K telah melakukan pemodelan serupa saat membangun BDT 2011 dengan memanfaatkan data SUSENAS 2011 sebagai sampel. Pada bagian ini akan disampaikan lima tahapan utama dalam proses pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari: (1) pemilihan data dan sampel, (2) pemilihan variabel, (3) pemilihan model, (4) proses estimasi dan skoring, serta (5) proses transformasi persentil pada masing-masing rumah tangga.

5.1. Pemilihan Data dan Sampel untuk Pemodelan

Pemakaian data SUSENAS sebagai sampel untuk pemodelan mempunyai masalah tersendiri yang harus diatasi dengan menggunakan teknik statistik, agar memenuhi persyaratan ilmiah.

5.1.1. Jumlah Data sebagai Sampel

Tujuan pemodelan adalah untuk memberikan prediksi pengeluaran rumah tangga pada PBDT 2015 yang pada prinsipnya merupakan 40% rumah tangga terbawah di Indonesia. Meski demikian, proses pemodelan harus menggunakan data SUSENAS yang utuh (100%) sebagai sampel. Jika pemodelan hanya menggunakan 40% rumah tangga terbawah dari data SUSENAS, akurasi analisa akan berkurang karena beberapa alasan berikut:

1. Human error dalam pendataan lapangan

Meskipun daftar rumah tangga BDT 2015 yang didata telah diseleksi dengan ketat dan disahkan oleh pemerintah daerah, namun masih terdapat kemungkinan belum terdatanya seluruh penduduk miskin (*exclusion error*) atau justru masuknya penduduk yang tidak miskin ke dalam daftar (*inclusion error*). Terjadinya kesalahan ini dapat disebabkan oleh kesulitan geografis untuk mencapai rumah tangga miskin saat pendataan dan subjektivitas dalam penilaian tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, membatasi penggunaan data SUSENAS hanya akan mengurangi representasi data dalam menggambarkan rumah tangga PBDT.

2. Jumlah sampel

Pemodelan, terutama di tingkat kabupaten/kota membutuhkan jumlah sampel yang besar. Pemotongan sampel akan mengurangi akurasi model dan meningkatkan tingkat kesalahan (*standard error*).

3. Variasi pada sampel

Sampel yang utuh diperlukan agar model dapat mengenali variabel mana yang membedakan antara pengeluaran rumah tangga miskin dan rumah tangga yang tidak miskin. Jika seluruh sampel yang digunakan merupakan rumah tangga miskin saja atau sebaliknya, model akan sulit menemukan variabel yang menjadi pembeda yang signifikan.

5.1.2. Karakteristik SUSENAS

SUSENAS adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga yang dilakukan secara *sampling*. Pada tahun 2011 sampai 2014, SUSENAS dilaksanakan setiap triwulan, yakni pada bulan Maret (triwulan I), Juni (triwulan II), September (triwulan III), dan Desember (triwulan IV). Khusus untuk tahun 2014, pendataan triwulan IV tidak dilakukan karena keterbatasan dana. Jumlah sampel SUSENAS untuk setiap triwulan berkisar pada angka 77 ribu rumah tangga serta memiliki keterwakilan di tingkat nasional dan provinsi.

Setiap akhir tahun BPS menyiapkan SUSENAS *pool* yang merupakan penggabungan data tiap triwulan untuk keperluan analisa di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk memperkuat jumlah sampel pemodelan, dilakukan penggabungan data SUSENAS *pool* tahun 2011-2014. Lebih tepatnya menggabungkan data triwulan dari Maret 2011 hingga September 2014. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah observasi dan memungkinkan estimasi di tingkat kabupaten/kota.

Penggabungan SUSENAS empat periode triwulan menjadi satu *pool data* memunculkan setidaknya dua permasalahan terkait validitas data. Pertama, menyangkut *weighting issues* yakni angka pembobot rumah tangga dan penduduk. Kedua, terkait dengan *inflation and seasonality*, yakni penyesuaian harga dari pengeluaran konsumsi per kapita, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan musim.

5.1.3. Rekomposisi Pembobot Rumah Tangga dan Individu

Proses penting dalam *data pooling* adalah *re-weighting* atau merekomposisi pembobot penduduk dan rumah tangga. Setiap periode SUSENAS mempunyai pembobot agar sampel data merepresentasikan jumlah penduduk dan rumah tangga menurut provinsi, perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, jika dilakukan *data pooling* untuk empat periode SUSENAS tanpa melakukan rekomendasi pembobot, akan diperoleh jumlah penduduk Indonesia yang melebihi jumlah riil. Pembobot ini harus direkomposisi menurut kerangka sampel (*sampling frame*) penduduk yang digunakan dalam SUSENAS hingga menjadi satu tahun dasar.

Kerangka sampel digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian estimasi jumlah penduduk dan rumah tangga Indonesia. Pembobot untuk sampel SUSENAS berasal dari proyeksi penduduk pada tahun 2015 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), yang disusun menurut provinsi perkotaan/perdesaan, jenis kelamin dan kelompok umur. Sementara itu komposisi tingkat kabupaten/kota

di dalam provinsi menggunakan *distribution share* dari SP 2010 per kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi. Tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan sebagai bagian dari penyiapan dan pengembangan pemodelan untuk PBDT 2015.

5.1.4. Indeks Kesulitan Geografis (IKG)

Selain karakteristik rumah tangga, kondisi geografis juga berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga sehingga diperlukan faktor koreksi wilayah. Dalam pemodelan ini digunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang diolah dari data PODES 2014. IKG merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap tingkat wilayah desa. Semakin besar angka indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

IKG terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama mencakup ketersediaan, jarak, dan kemudahan akses pelayanan dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Komponen kedua adalah kondisi infrastruktur seperti keberadaan fasilitas ekonomi, akses penerangan, dan akses bahan bakar untuk memasak. Komponen ketiga adalah akses transportasi seperti jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, dan keberadaan serta beroperasinya angkutan umum. Dalam pemodelan ini, angka IKG merupakan salah satu determinan yang digunakan untuk memprediksi tingkat pengeluaran rumah tangga.

5.1.5. Penyesuaian Harga Pengeluaran Rumah Tangga

Perbedaan waktu pencacahan SUSENAS akan mengakibatkan perbedaan nilai pengeluaran rumah tangga yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor ekonomi serta *seasonality* (pola musim). Kedua faktor tersebut akan mempengaruhi nilai atau harga dari setiap item pengeluaran rumah tangga (inflasi/deflasi).

Implikasi dari masalah tersebut adalah nilai pengeluaran rumah tangga yang tidak sebanding antar periode SUSENAS. Hal ini akan menimbulkan bias dan menyulitkan interpretasi pada saat mengestimasi model konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat diatasi dengan membuat penyesuaian konsumsi rumah tangga menggunakan *deflator* tertentu.

Garis kemiskinan yang telah dihitung BPS di setiap periode SUSENAS merupakan salah satu *deflator* yang dapat digunakan untuk membuat standarisasi *real* pengeluaran rumah tangga sehingga antar periode SUSENAS menjadi setara. Dengan konsep *time-spatial adjustment* (penyesuaian antar waktu dan lokasi), dapat dibuat suatu nilai nyata yang mencerminkan keterbandingan pengeluaran rumah tangga antar waktu dan antar wilayah.



5.2. Pemilihan Variabel

Dalam pemodelan PMT dua set data digunakan. Data pertama adalah survei rumah tangga SUSENAS yang memiliki variabel pengeluaran per kapita serta komposisi karakteristik demografi dan sosial-ekonomi. Data SUSENAS tersebut dijadikan sebagai sumber data untuk pemodelan regresi yang menghasilkan estimasi koefisien dari tiap karakteristik. Data kedua adalah PBDT 2015 yang menjadi data target untuk dibuatkan prediksi pengeluaran per kapita rumah tangga. Kedua set data ini memiliki *overlapped variables* yakni sejumlah variabel dengan jenis, karakteristik dan tipe yang sama.

5.2.1. Variabel *independent* atau variabel bebas

Variabel bebas dalam pemodelan PMT adalah variabel karakteristik rumah tangga yang relevan untuk memprediksi pengeluaran rumah tangga. Secara umum, pemodelan 2015 menggunakan variabel yang sama dengan pemodelan 2011. Namun berdasarkan pembelajaran dari pemodelan sebelumnya, pemodelan 2015 dilakukan dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Melibatkan karakteristik seluruh anggota keluarga

Karakteristik rumah tangga tidak hanya mengutamakan karakteristik kepala rumah tangga, tetapi juga mengikutsertakan karakteristik seluruh anggota rumah tangga. Hal ini dikarenakan penentuan posisi kepala keluarga sering tidak konsisten. Ayah, suami, orang yang dituakan, atau pencari nafkah utama dapat dianggap sebagai kepala keluarga, tergantung daerah.

2. Variabel 'bahan bakar untuk memasak'

Pada saat pengecekan distribusi data, terdapat 50% rumah tangga SUSENAS yang menggunakan bahan bakar untuk memasak dengan kategori "lainnya." Sementara pada rumah tangga BDT, untuk kategori ini hanya ada 2%. Perbedaan distribusi yang sangat besar seperti ini akan menimbulkan bias dalam koefisien regresi. Oleh karena itu, variabel bahan bakar untuk memasak dikeluarkan dari model.

3. Pengurangan variabel berulang

Variabel yang dirasa berulang dikurangi untuk memaksimalkan rasio sampel dan variabel bebas. Sebagai contoh, model 2011 yang memasukan variabel sektor lapangan kerja dan *dummy* variabel untuk kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian.

4. Pengelompokan variabel (Tukey)

Penyederhanaan variabel juga dilakukan untuk meningkatkan rasio sampel dan variabel bebas. Metode *Tukey* menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kategori dalam variabel. Variabel yang secara statistik tidak berbeda dikelompokkan ke dalam satu kategori yang sama. Sebagai contoh, variabel status kepemilikan bangunan yang awalnya memiliki tujuh kategori dikelompokkan ulang menjadi empat kategori, yaitu: milik sendiri, bebas sewa/lainnya, sewa/kontrak, dan dinas.

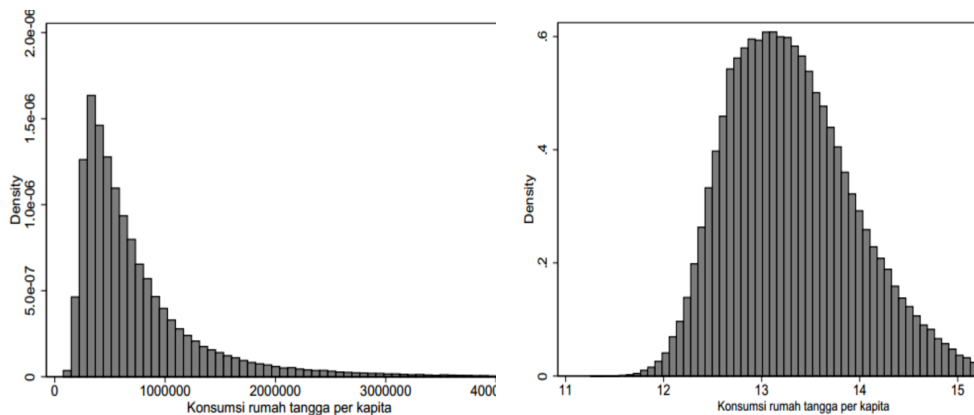
5. Memprediksi pengeluaran RT berdasarkan karakteristiknya

Semua variabel karakteristik rumah tangga dibuat menjadi *dummy variable*, sedangkan variabel karakteristik individu dibuat menjadi jumlah anggota rumah tangga dengan karakteristik tersebut.

5.2.2. Variabel dependent atau variabel terikat

Variabel *dependent* dalam pemodelan ini adalah pengeluaran rumah tangga. Pada tahap awal pemodelan, hasil distribusinya dapat dilihat pada gambar berikut. Grafik di sisi kiri adalah hasil distribusi tanpa log yang terlihat *skewed* (condong) ke kiri. Akibatnya, pada grafik ini tidak terlihat perbedaan *expenditure* antara rumah tangga miskin dan yang tidak miskin. Untuk itu, variabel pengeluaran rumah tangga harus dibuat ke dalam log sebagaimana yang terlihat pada grafik di sisi kanan.

Gambar 20. Perbandingan Variabel Terikat, Tanpa Log dan Dengan Log



Tabel 4. Klasifikasi Variabel menurut Kelompok

Grup Variabel	Nama Variabel
Pengeluaran	Pengeluaran per kapita
Demografi	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga; Jumlah Anggota Rumah Tangga; Usia Kepala Rumah Tangga; Usia Anggota Rumah Tangga; Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga; Jumlah Anggota Rumah Tangga Dengan Rentang Usia Tertentu (Dependency Ratio)
Pendidikan	Pendidikan SD, SMP, SMA+: Kepala Rumah Tangga; dan Pendidikan SD, SMP, SMA+: Anggota Rumah Tangga
Pekerjaan	Sektor Pekerjaan; dan Status Pekerjaan
Fasilitas Rumah	Jenis Lantai; Jenis Atap; Jenis Dinding; Penerangan Utama; Sumber Air Minum; Sanitasi; dan Status Kepemilikan Rumah
Kepemilikan Asset	Sepeda, Sepeda Motor, Kulkas, Gas 12 kg untuk Memasak Perahu Telepon Rumah
Spasial/Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis

Sumber: Kuesioner PBDT, olahan Tim Penyusun BDT. Variabel yang lebih rinci dapat dilihat di lampiran.

5.3. Pemilihan Model

5.3.1. Tahap Uji Awal Statistik

Sebelum menjalankan regresi PMT, serangkaian uji awal statistik dilakukan terhadap karakteristik demografi dan sosial-ekonomi rumah tangga. Diantaranya adalah tahap pengujian beda rata-rata dan beberapa uji tambahan lain dengan tujuan untuk menyempurnakan prediksi PMT.

Karena perhitungan pengeluaran per kapita rumah tangga dalam PBDT 2015 berdasarkan koefisien variabel karakteristik rumah tangga yang dihasilkan dari estimasi regresi data SUSENAS, uji statistik variabel yang identik di kedua data,

SUSENAS dan PBDT 2015, menjadi penting untuk dilakukan. Tim melakukan empat jenis pengujian yang dilakukan pada data SUSENAS dan PBDT 2015, yaitu: 1) Tes pengeluaran konsumsi; 2) Ketersediaan variabel identik; 3) Uji frekuensi; dan 4) Uji beda dua rata-rata pada setiap variabel yang identik.

PBDT 2015 diasumsikan mencakup distribusi 40% rumah tangga dengan kondisi sosial-ekonomi terendah secara nasional, sedangkan SUSENAS diasumsikan mewakili seluruh rumah tangga atau penduduk Indonesia. Secara statistik, tidak semua hasil observasi SUSENAS diperlukan untuk melakukan estimasi pada data PBDT 2015. Oleh karena itu, untuk pemodelan PMT, dilakukan iterasi simulasi yang bertujuan untuk menentukan ambang batas persentil yang menunjukkan prediksi pengeluaran per kapita PBDT 2015, yang setara atau mendekati pengeluaran per kapita pada SUSENAS (*segmented/piecewise*).

Pada tahap awal, dengan menggunakan pendekatan regresi bertahap (*stepwise*), model diestimasi pada seluruh (100%) distribusi pengeluaran per kapita pada data SUSENAS. Selanjutnya, iterasi dilakukan secara menurun untuk setiap satu persen, hingga hasil prediksi pengeluaran konsumsi per kapita di PBDT 2015 mirip dengan (*mimicking*) konsumsi per kapita aktual SUSENAS. *Cut-off percentile* yang mencerminkan ambang pengamatan adalah tingkatan yang akan digunakan dalam proses estimasi selanjutnya.

Frekuensi setiap variabel dalam SUSENAS juga perlu diuji. Hal ini dikarenakan SUSENAS merupakan survei rumah tangga yang tidak mencakup seluruh wilayah. Apabila banyak rumah tangga yang tidak menjawab pertanyaan tertentu atau tidak ada variabel dalam beberapa distribusi *cut-off* pengeluaran per kapita, koefisien parameter akan menjadi bias. Sebagai contoh, rumah tangga yang memiliki aset gas untuk memasak jumlahnya sangat sedikit. Hanya rumah tangga dengan pengeluaran konsumsi tinggi yang memilikinya. Hal tersebut akan menyebabkan parameter estimasi kepemilikan aset gas akan mencerminkan tingkat konsumsi rumah tangga berpengeluaran tinggi.

5.3.2. Kriteria Pemilihan Model

Pemilihan model statistik yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan prediksi pengeluaran, dengan melihat angka-angka *R-square*, *exclusion error* dan *inclusion error*. Terdapat tiga kriteria yang dipakai untuk menentukan model regresi terbaik yaitu:

1. Koefisien determinasi atau *R-square* (yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikatnya) sebesar 64,0%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 36% (100%-64%) variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain.



2. *Adjusted R-square*. Penggunaan *R-square* sering menimbulkan permasalahan, yaitu nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini berpotensi menimbulkan bias karena jika ingin memperoleh model dengan *R-square* tinggi, seorang peneliti dapat menambahkan variabel bebas secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan apakah variabel bebas yang ditambahkan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak.

Oleh karena itu, banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan *Adjusted R-square*. Interpretasinya sama dengan *R-square*, akan tetapi naik atau turunnya nilai *Adjusted R-square* ditentukan tidak hanya oleh jumlah variabel bebas tetapi juga korelasi antara variabel bebas tambahan dengan variabel terikatnya. *Adjusted R-square* juga dapat bernilai negatif, yang dianggap bernilai nol yang menunjukkan bahwa variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya.

3. Prediksi yang dihasilkan model statistik tidak sempurna. *Inclusion error* adalah kesalahan pemodelan yang menyebabkan rumah tangga yang tidak berhak menerima manfaat justru menjadi penerima manfaat. Sementara itu, *exclusion error* adalah kesalahan pemodelan yang menyebabkan rumah tangga yang berhak menerima manfaat tidak menerima bantuan sosial. *Exclusion* dan *inclusion errors* merupakan konsekuensi dari penggunaan metode statistik yang sulit dihindari. Untuk meminimalisasi *error* tersebut, kuncinya ada pada pemilihan model yang tepat.

Berdasarkan tiga kriteria di atas, *forward-stepwise* menjadi pilihan metode pemodelan 2015. Metode ini secara otomatis memilih variabel yang signifikan dan mengeluarkan variabel yang tidak signifikan.

5.3.3. Penyesuaian Model dari Hasil *Ground Check*

Setelah hasil pemodelan selesai, BPS melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa akurasi prediksi pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Dari pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa rumah tangga tunggal cenderung memiliki *Yhats* atau perkiraan pengeluaran yang lebih tinggi dari seharusnya. Untuk mengatasi hal ini *Yhats* rumah tangga tunggal kemudian dikalikan dengan faktor koreksi. Penyesuaian ini dilakukan agar seluruh rumah tangga tunggal tetap dapat terkategori sebagai rumah tangga miskin.

Pelaksanaan Ground Check Hasil PMT Kab. Pulang Pisau

Ground check (GC) dilakukan untuk menguji kecocokan model PMT yang dihasilkan untuk setiap kabupaten. Model PMT digunakan untuk pemeringkatan rumah tangga hasil PBDT. Kegiatan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama oleh tim untuk memastikan akurasi hasil pemeringkatan. Prosedur pelaksanaan lapangan disosialisasikan melalui bimbingan teknis oleh Kepala Seksi Statistik Sosial.

GROUND CHECK DI DESA PURWODADI



GC dilakukan di desa sampel SUSENAS pada bulan Maret 2015. Jumlah desa sampel GC di Kabupaten Pulang Pisau adalah 37 desa. Di setiap desa dikunjungi 10 rumah tangga. Dari 10 rumah tangga tersebut, 5 rumah tangga merupakan rumah tangga dengan nilai perkiraan pendapatan terendah, sedangkan 5 rumah tangga lainnya adalah rumah tangga dengan nilai perkiraan pendapatan tertinggi di desa tersebut.

GROUND CHECK DI DESA PANGKOH HULU



Petugas GC adalah tim *task force* PBDT Kabupaten Pulang Pisau. Petugas akan mendatangi kesepuluh rumah tangga, lalu memberikan penilaian pada rumah tangga tersebut sesuai dengan kelompoknya.

GROUND CHECK DI DESA KANAMIT



Hasil pelaksanaan GC menyimpulkan bahwa 87,84% rumah tangga dinyatakan cocok dengan hasil pemeringkatan perkiraan pengeluaran rumah tangga *Yhats*. Selanjutnya tim melakukan penyesuaian terhadap model yang digunakan berdasarkan input yang diperoleh di lapangan dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi pemodelan.

5.4. Proses Estimasi dan Pemberian Skor

Pemodelan menghasilkan koefisien regresi untuk setiap variabel. Koefisien ini menggambarkan besaran pengaruh variabel terhadap tingkat pengeluaran per kapita dengan persamaan berikut:

$$\ln Y_i = \hat{\alpha} + X_i' \hat{\beta} + \varepsilon_i$$

Y_i : log pengeluaran per kapita

$\hat{\alpha}$: *intercept*

$\hat{\beta}$: koefisien regresi untuk kelompok variabel bebas X untuk rumah tangga i

ε_i : *error*

Pemangkatan eksponensial jumlah koefisien signifikan menghasilkan nilai nominal prediksi pengeluaran per kapita dengan persamaan berikut:

$$\hat{Y}_i = \exp(\hat{\alpha} + X_i' \hat{\beta})$$

Selanjutnya, rumah tangga diurutkan di setiap kabupaten/kota masing-masing berdasarkan *Yhats* atau perkiraan pengeluaran per kapita.

5.5. Proses Transformasi Persentil

Perankingan rumah tangga berdasarkan *Yhats* di setiap kabupaten/kota, belum menggambarkan peringkat rumah tangga tersebut pada skala yang lebih luas, yaitu di tingkat nasional. Sementara itu distribusi manfaat suatu program berskala nasional membutuhkan informasi yang mampu menerjemahkan kuota nasional tersebut dalam presentase ke dalam angka jumlah rumah tangga di setiap daerah.

Perangkingan secara nasional tidak dilakukan dengan memberikan ranking satu persatu kepada rumah tangga, tetapi dengan memasukan rumah tangga ke dalam kategori *percentile* nasional. Perangkingan demikian membutuhkan proses transformasi agar *Yhats* dapat dibandingkan antar daerah. Proses transformasi ini dilakukan dengan memanfaatkan SUSENAS sebagai standar batas atas nilai pengeluaran rumah tangga di setiap daerah. Metode ini dikenal dengan pendekatan *threshold*.

Tahapan dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Membagi jumlah rumah tangga SUSENAS ke dalam 100 bagian yang sama besar/*percentile*;
2. Mencatat nilai maksimum pengeluaran rumah tangga di setiap *percentile*;
3. Mengelompokkan rumah tangga BDT ke dalam *percentile* berdasarkan *Yhats*. Untuk setiap *percentile*, *Yhats* lebih kecil atau sama dengan nilai maksimum pengeluaran rumah tangga yang diperoleh pada langkah kedua.

Dengan menggunakan metode ini, jumlah rumah tangga di setiap persentil berdasarkan SUSENAS tidak sama dengan jumlah rumah tangga hasil BDT. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga SUSENAS tidak menjadi patokan untuk jumlah rumah tangga yang harus didata di lapangan. Jumlah rumah tangga yang harus didata di setiap daerah bergantung pada jumlah rumah tangga PPLS 2011, ditambah dengan rumah tangga penerima program dan hasil FKP. Oleh karena itu, jumlah rumah tangga BDT di setiap persentil dapat melebihi atau bahkan lebih sedikit dari jumlah rumah tangga di persentil tersebut yang berdasarkan SUSENAS.

Kuota juga dapat diambil dengan menghitung langsung jumlah rumah tangga dari SUSENAS yang dikenal dengan metode *fixed-quota*. Namun cara ini dapat menemukan kendala ketika jumlah rumah tangga yang terdata di lapangan, ternyata lebih kecil dari jumlah kuota berdasarkan SUSENAS. Turunnya kuota 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga dapat menimbulkan protes di daerah. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor di atas, maka penetapan kuota memperhitungkan tiga faktor berikut:

1. Jumlah rumah tangga menurut kuota 2011
2. Jumlah rumah tangga menurut SUSENAS 2014
3. Jumlah rumah tangga yang didata dalam PBDT 2015.



5.6. Contoh Penerapan Hasil

5.6.1. Cara Menetapkan Jumlah Rumah Tangga 10% Terbawah Nasional di Kota Denpasar

Proses penetapan jumlah rumah tangga persentil 10 nasional di setiap kabupaten/kota dimulai dengan menetapkan jumlah rumah tangga persentil 1 sampai dengan persentil 10 di masing-masing kabupaten/kota. Proses ini menggabungkan metode *threshold* dan metode *fixed-quota* ditambah dengan re-alokasi kuota di daerah *over-enumerated* ke daerah *under-enumerated*. Penggabungan metode *threshold* dan *fixed-quota* selanjutnya dikenal sebagai metode *hybrid*.

Daerah *over-enumerated* adalah daerah yang jumlah rumah tangga terdata pada PBDT 2015 lebih besar daripada jumlah rumah tangga menurut SUSENAS, sedangkan daerah *under-enumerated* adalah daerah dengan jumlah rumah tangga yang didata pada PBDT 2015 lebih sedikit daripada jumlah rumah tangga menurut SUSENAS. Daerah *under-enumerated* tidak dapat memenuhi jumlah rumah tangga yang ditentukan oleh metode *fixed-quota*, sedangkan daerah *over-enumerated* memiliki surplus jumlah rumah tangga dari jumlah yang ditentukan oleh metode *fixed-quota*.

Penentuan jumlah rumah tangga yang harus direalokasikan dari daerah *over-enumerated* kepada daerah *under-enumerated* ditentukan melalui batas toleransi persentil dan *Yhats*. Batas toleransi yang diambil pada BDT 2015 sebesar 5 persentil dengan batas toleransi *Yhats* sebesar 25%. Arti dari batas toleransi ini adalah jika rumah tangga BDT 2015 di setiap persentil lebih kecil daripada jumlah menurut SUSENAS, rumah tangga dari persentil 1 sampai 5 di atasnya masih dapat dimasukkan dengan syarat bahwa:

1. *Yhats* dari rumah tangga tidak melebihi 25% dari batas atas pengeluaran rumah tangga menurut SUSENAS 2014.
2. Maksimal jumlah rumah tangga adalah sebesar jumlah rumah tangga menurut SUSENAS (metode *fixed-quota*).

Setelah batas realokasi ditentukan, metode *hybrid* menetapkan jumlah rumah tangga di setiap persentil dengan mengikuti langkah sebagai berikut:

1. Untuk setiap persentil, hitung jumlah rumah tangga menurut metode *fixed-quota*
2. Untuk setiap persentil, hitung batas atas pengeluaran menurut SUSENAS 2014.
3. Untuk persentil 1, sebagai contoh, Kota Denpasar merupakan daerah *under-enumerated* maka rumah tangga sampai dengan persentil 6

masih dapat dimasukkan ke dalam persentil 1 jika *Yhats* rumah tangga masih dibawah $1.25 \times Yhats$ persentil 1 menurut metode *threshold*.

4. Jumlah maksimal rumah tangga persentil 1 adalah sejumlah rumah tangga persentil 1 menurut metode kuota.
5. Jumlah total rumah tangga 10% terbawah di Kota Denpasar diperoleh dengan menambahkan jumlah rumah tangga persentil 1 sampai dengan persentil 10.

Tabel 5. Distribusi Rumah Tangga Menurut Persentil dan Metode yang Digunakan

Deskripsi	Persentil									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Rumah tangga metode <i>threshold</i>	186	239	144	205	211	226	148	1.522	1.706	1.796
Jumlah rumah tangga metode <i>fixed-quota</i>	1.189	1.764	1.221	1.266	1.019	793	796	1.565	433	2.727
Jumlah rumah tangga metode <i>hybrid</i>	1.126	39	18	55	124	42	71	42	60	84
1.25 dari nilai maksimal pendapatan per kapita - Ribu Rupiah (SUSENAS 2014)	344	395	415	441	464	487	501	516	533	541

Sumber: Hasil simulasi.

Tabel di atas merangkum jumlah rumah tangga persentil 1 sampai dengan persentil 10 menurut metode *fixed-quota* dan menurut metode *threshold*; $1.25 \times$ batas atas pengeluaran setiap persentil dari SUSENAS; serta jumlah rumah tangga berdasarkan metode *hybrid*.

Kota Denpasar merupakan contoh daerah *under-enumerated*, yakni jumlah rumah tangga yang terdata pada PBDT 2015 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah tangga 40% terbawah yang seharusnya berada di kota tersebut menurut SUSENAS. Menurut SUSENAS 2014, terdapat 51.985 rumah tangga 40% terbawah di Kota Denpasar. Namun, PBDT 2015 hanya mengumpulkan data 12.544 rumah tangga di kota tersebut. Hal ini menyebabkan jumlah rumah tangga di setiap persentil akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah rumah tangga menurut SUSENAS.

Metode *hybrid* membantu memasukkan rumah tangga semaksimal mungkin dengan batasan tertentu pada *Yhats*. Namun besar selisih antara rumah tangga yang terdata dengan jumlah rumah tangga menurut SUSENAS menyebabkan



metode *hybrid* hanya dapat menjangkau 1.661 rumah tangga 10% terbawah nasional di Kota Denpasar. Jumlah ini jauh di bawah jumlah menurut SUSENAS yang mencatat 12.773 rumah tangga 10% terbawah di kota tersebut.

5.6.2. Cara Menetapkan Sasaran Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, terdaftar sebagai penerima bantuan. Melalui KIP, anak-anak tersebut menerima bantuan biaya untuk menjalani pendidikan melalui jalur formal (mulai SD/MI hingga lulus SMA/SMK/MA) maupun melalui jalur pendidikan informal dan non-formal.

Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, menghilangkan hambatan ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah, sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Kedua, mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Ketiga, menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah. Keempat, membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi beberapa kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Terakhir, mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

Pada tahun 2016, Kemdikbud dan Kemenag meminta TNP2K untuk memutakhirkan kepesertaan program PIP dan program lainnya bagi anak usia 7-21 tahun, menggunakan data BDT. Secara umum, BDT memiliki data 26.8 juta anak usia 7-21 tahun, namun anggaran Kemdikbud hanya cukup membiayai 20 juta anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang dapat menjangkau 20 juta anak termiskin usia 7-21 tahun dari BDT. Penerima PIP pada tahun sebelumnya juga harus dipertahankan agar mereka tidak berhenti sekolah.

Yhats berada di level rumah tangga. Oleh karena itu, langkah awal adalah menjawab berapa banyak rumah tangga yang harus diambil untuk memperoleh 20 juta anak usia 7-21. Pertanyaan ini dijawab melalui estimasi jumlah rumah tangga dengan menggunakan data SUSENAS 2014. Data ini dipilih karena merupakan data terbaru dengan kapasitas estimasi di tingkat kabupaten/kota. Menurut SUSENAS 2014, rumah tangga persentil 1 sampai dengan persentil 22 dapat memberikan kurang lebih 20 juta anak usia 7-21. Melalui SUSENAS, informasi batas maksimum *Yhats* untuk persentil 22 diperoleh untuk setiap kabupaten/kota.

Metode *threshold* memasukkan seluruh rumah tangga dengan *Yhats* di bawah batas maksimum *Yhats* untuk persentil 22 sesuai SUSENAS. Metode ini meminimalisasi *inclusion error* dengan menjamin tidak terjaringnya rumah tangga dengan *Yhats* diatas batas maksimum SUSENAS. Namun dalam kasus penghitungan kuota KIP, metode *threshold* hanya mampu menjaring 17 juta anak usia 7-21 tahun pada BDT. Hal ini dikarenakan oleh dua hal yaitu: (1) adanya perbedaan komposisi demografi keluarga miskin menurut SUSENAS dan menurut BDT; dan (2) kecenderungan *Yhats* rumah tangga BDT yang lebih tinggi dari tingkat pengeluaran rumah tangga menurut SUSENAS.

Metode *fixed-quota* memberikan informasi jumlah rumah tangga yang seharusnya berada pada persentil 22 untuk setiap daerah. Namun metode ini tidak dapat mengontrol masuknya rumah tangga dengan *Yhats* yang terlalu tinggi. Untuk melengkapi kekurangan jumlah anak di setiap daerah secara objektif, diperlukan metode *hybrid*, yaitu penggabungan metode *threshold* dengan metode *fixed-quota* sebagai jalan tengah.

Metode *hybrid* menggabungkan informasi batas maximum *Yhats* dari metode *threshold* dan informasi jumlah rumah tangga yang harusnya berada pada persentil 22 dari metode *fixed-quota*. Selain itu metode *hybrid* memerlukan ketetapan toleransi batas atas *Yhats* dan toleransi pergeseran jumlah kuota (*shift tolerance*). Toleransi sebesar 15 persentil untuk target rumah tangga 40% terbawah atau persentil 40 berarti seluruh rumah tangga dengan *Yhats* dibawah batas atas persentil 55 dapat masuk ke dalam kuota.

Namun, toleransi itu dapat menyebabkan jumlah kuota melonjak tinggi sehingga dibutuhkan batas tambahan. *Shift tolerance* memberikan batas toleransi pergeseran jumlah kuota di suatu daerah. Toleransi sebesar 10% artinya jumlah kuota daerah setelah penerapan *Yhats tolerance* tidak boleh kurang atau lebih 10% dari jumlah kuota seharusnya.

Penerapan *Yhats tolerance* 15 dan *shift tolerance* 10 berarti untuk jumlah rumah tangga setiap daerah adalah salah satu dari opsi berikut:

1. Jumlah rumah tangga menurut metode *fixed-quota* dimana *Yhats* rumah tangga lebih kecil dari tingkat pengeluaran rumah tangga kelompok persentil 37 menurut SUSENAS.
2. Jumlah seluruh rumah tangga persentil 37 dimana jumlah ini tidak kurang atau tidak lebih 10% dari jumlah menurut metode *fixed-quota*.





6

Tantangan Penyempurnaan Berkelanjutan





Tantangan Penyempurnaan Berkelanjutan

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 merupakan keputusan penting yang diambil pemerintah. Hasilnya adalah data komprehensif yang mendukung akurasi pemilihan sasaran berbagai program pengentasan kemiskinan. BDT 2015 mencakup hampir semua (40%) populasi penduduk Indonesia dengan status kesejahteraan terbawah, yang terverifikasi *by name by address*. Selain itu, BDT 2015 juga mencakup parameter kemiskinan yang diukur dari kondisi sosial-ekonomi yang lebih beragam. Dengan demikian, itu BDT 2015 memungkinkan perencanaan program memilih sasaran secara lebih detil, sehingga program bisa dilaksanakan secara optimum.

Menimbang manfaatnya yang signifikan dalam perencanaan program, BDT perlu dipertahankan dan terus disempurnakan. Pemutakhiran perlu dilakukan secara periodik mengingat kemiskinan bersifat dinamis. Ada berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan rumah tangga keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya dapat disebabkan oleh keberhasilan program yang dijalankan pemerintah. Dalam keadaan demikian akan diperlukan program baru dan data baru. Namun, upaya pemutakhiran kemungkinan besar akan menghadapi kendala dalam hal biaya yang perlu dipikirkan jalan keluarnya.

Pemutakhiran BDT pada tahun 2015 membutuhkan anggaran yang relatif besar yakni 33 milyar. Inovasi dalam penetapan daftar awal sasaran pendataan melalui FKP memerlukan dana jauh lebih besar dibandingkan pemutakhiran pada periode sebelumnya. Namun metode ini penting untuk mengkonfirmasi rumah tangga miskin yang sudah ada mau pun yang perlu ditambahkan dalam daftar. Semua data dapat dipastikan keberadaannya *by name by address*. Prosesnya dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan data. Untuk menekan biaya, pemutakhiran pada masa mendatang dapat dihemat dengan mengurangi skala sasaran pendataan serta tetap melibatkan pemerintah daerah.

Dalam hal pengolahan data, PBDT 2015 menggunakan metodologi yang relatif sama dengan periode sebelumnya, yakni didasarkan pada pendekatan ilmiah seperti teknik-teknik statistik, ekonometrik dan *data mining*. Penerapan metode ilmiah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan meskipun tetap terbuka peluang untuk perbaikan.

Kedua, perbaikan penetapan sasaran program pemerintah perlu dilakukan dengan memutakhirkan model pemeringkatan rumah tangga. Model pemeringkatan rumah tangga yang ada saat ini disusun berdasarkan kondisi aktual pada tahun yang sama dengan pendataan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan terjadi kekurang-akuratan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya potensi perubahan karakteristik wilayah yang salah satunya dapat disebabkan oleh

pemekaran wilayah. Selain itu, terdapat kemungkinan perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk mempertajam sistem penetapan sasaran program-program yang dilakukan pemerintah, diperlukan upaya untuk menyempurnakan model atau sistem pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga melalui kajian dan uji coba penerapan model alternatif yang dapat mengakomodasi dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Hal ini sangat penting dilakukan dan memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan rekomendasi sebelumnya mengenai metode pemutakhiran berkala.

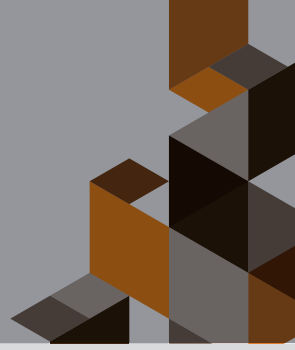
Ketiga, pelibatan pemerintah daerah dalam PBDT 2015 relatif lebih intens jika dibandingkan dengan pendataan serupa pada periode sebelumnya. Dalam penyempurnaan basis data pada masa mendatang, pemerintah daerah perlu dilibatkan secara lebih aktif pada setiap tahapan karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pengguna data. Selain sebagai upaya transfer pengetahuan, dalam hal ini pemerintah daerah juga diharapkan ikut bertanggung jawab dalam penyempurnaan BDT. Partisipasi pemerintah daerah sekaligus juga menjadi proses *buy-in*, yang akan mendorong munculnya dukungan serta pengakuan terhadap keberadaan BDT oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Keempat, pelibatan komunitas dalam mengidentifikasi daftar awal sasaran pendataan dan verifikasi daftar calon penerima manfaat program. "*Voice from the poor*" merupakan embrio *buy-in* masyarakat terhadap basis data kemiskinan. Pada PBDT 2015 akses ini dibuka melalui FKP. Hasilnya muncul rumah tangga hasil penjangkauan yang selama ini belum terdapat dalam BDT. Selain itu, terdapat ada rumah tangga yang dikeluarkan dari daftar karena tidak tergolong miskin serta sudah tidak ada lagi di wilayah yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat seperti melalui FKP perlu dilakukan. Masyarakat miskin diberi kesempatan untuk ikut memeriksa daftar awal sasaran penerima manfaat program. Pendekatan yang dikenal dengan *'public opinion* atau uji publik ini perlu diperluas sampai dengan proses penetapan sasaran, sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap BDT. Namun demikian, perlu disusun mekanisme yang paling efisien dan efektif karena BDT merupakan data dengan jumlah rumah tangga yang sangat besar.



Lampiran



1. Contoh Daftar Awal Rumah Tangga: PBBDT2015.PPLS



Halaman 1 dari 1 Halaman

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

RAHASIA

FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015

PBBDT2015.PPLS

BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS						
1	Provinsi	NUSA TENGGARA BARAT	5 2	5	Nama SLS lengkap dibawah Desa/ Kelurahan/Nagari *)	Tingkat 1: DUSUN DASAN BARU
2	Kabupaten/Kota *)	LOMBOK BARAT	0 1			Tingkat 2: RT 002
3	Kecamatan	SEKOTONG	0 1 0			Tingkat 3:
4	Desa/Kelurahan/Nagari *)	PELANGGAN	0 0 1			6
BLOK II. DAFTAR RTS						
No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) Lainnya	Alamat lengkap (nama jalan/gang/orong&nomor, RT/RW/dusun)	Apakah rumah tangga mash ada? 1. Ada 2. Tidak ada karena pindah 3. Tidak ada karena meninggal semua 4. Tidak dikenal (Lengkap KODE)	Keterangan	Telah diperiksa oleh asisten fasilitator (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MAISAH/ 5201074107790084	SANI/ 5201076501850003	DUSUN DASAN BARU RT 002	1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
2	SUPAWAN/	INAQ SUPAWAN/	DUSUN DASAN BARU RT 002	1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
3	MADIL/ 5201070107720170	ATI/ 5201077112760033	DUSUN DASAN BARU RT 002	1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
4	H AZHAR/ 5201010107720075		DUSUN DASAN BARU RT 002	1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
5	MAENAH/ 5201137112470030	LAHMUDIN/ 5201013112720002	DUSUN DASAN BARU RT 002	1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
6				1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
7				1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
8				1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
9				1 2 3 4		<input type="checkbox"/>
10				1 2 3 4		<input type="checkbox"/>

Nama : Jabatan : Tanda Tangan & Stempel:

*) Coret yang tidak sesuai

2. Contoh Daftar Awal Rumah Tangga: PBBDT2015.Program



Halaman 1 dari 1 Halaman

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

RAHASIA

FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015

PBBDT2015.Program

BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS									
1	Provinsi	NUSA TENGGARA BARAT	5 2	5	Nama SLS lengkap dibawah Desa/ Kelurahan/Nagari *)	Tingkat 1:			
2	Kabupaten/Kota *)	LOMBOK BARAT	0 1			Tingkat 2:			
3	Kecamatan	SEKOTONG	0 1 0			Tingkat 3:			
4	Desa/Kelurahan/Nagari *)	PELANGGAN	0 0 1			6	Jumlah RTS pada kol (5) yg berkode 1 dan kol (8) berkode 2 di SLS ini		
BLOK II. DAFTAR RTS									
No.	Nama	Alamat	Sumber Data	JIKA KOLOM (5) BERKODE 1			Keterangan	Telah diperiksa oleh asisten fasilitator (*)	
				Status (NAMA) dalam rumah tangga	Nama lengkap kepala rumah tangga	Apakah Nama kepala rumah tangga di Kol (7) ada di daftar PBBDT2015.PPLS? 1. Ada 2. Tidak ada (Lengkap (KODE))			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	HAMZAH WADI	DUSUN DASAN BARU RT 002	PMKSODK	1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
2	AININ	DUSUN DASAN BARU RT 003	PMKSODK	1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
3	BUHAIMIN	DUSUN GILI GEDE RT 003	RASKIN	1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
4	NI WAYAN ASTUTI	DUSUN PALUH TINGGI RT 001	PKH	1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
5	INAQ LENI	DUSUN SELINDUNGAN RT 001	PBI	1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
6				1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
7				1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
8				1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
9				1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>
10				1 2 3	1 2		1 2		<input type="checkbox"/>

Nama : Jabatan : Tanda Tangan & Stempel:

*) Coret yang tidak sesuai

4. Contoh Lembar Berita Acara Pelaksanaan FKP

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015

1	Provinsi		
2	Kabupaten/Kota *)		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan/Nagari *)		

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Dengan ini kami menyatakan:

Bahwa telah ikut berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 di wilayah ini dan memahami bahwa rumah tangga/keluarga hasil Forum Konsultasi Publik ini seluruhnya akan didata, tetapi penerima program bantuan akan ditetapkan oleh pemerintah.

No.	Nama SLS satu tingkat di bawah desa/ kelurahan	Jumlah RTS PBDT2015. PPLS	Jumlah RTS PBDT2015. Program	Jumlah Total RTS	Nama Kepala Dusun/RW/SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan	Tanda tangan
1.						1.
2.						2.
3.						3.
4.						4.
5.						5.
6.						6.
7.						7.
8.						8.
9.						9.
10.						10.
11.						11.
12.						12.
13.						13.
14.						14.
15.						15.
Total						

Catatan

Fasilitator

Kepala Desa/Kelurahan/Nagari*)

Nama & tanda tangan

Nama, tanda tangan & stempel

*) Coret yang tidak sesuai



5. Jumlah Rumah Tangga *Pre-list Awal* Menurut Provinsi dan Sumbernya menurut Provinsi

Provinsi	Prelist Awal		
	PPLS 11	Update Program	Total
ACEH	634.902	47.771	682.673
SUMATERA UTARA	1.103.216	114.248	1.217.464
SUMATERA BARAT	416.064	46.113	462.177
RIAU	375.482	30.083	405.565
JAMBI	254.089	20.826	274.915
SUMATERA SELATAN	758.801	81.055	839.856
BENGKULU	179.751	25.964	205.715
LAMPUNG	934.839	114.986	1.049.825
KEP. BANGKA BELITUNG	78.021	22.472	100.493
KEP. RIAU	94.959	13.626	108.585
DKI JAKARTA	317.172	47.608	364.780
JAWA BARAT	4.311.524	295.472	4.606.996
JAWA TENGAH	4.243.801	568.292	4.812.093
DI YOGYAKARTA	476.734	180.589	657.323
JAWA TIMUR	4.605.917	427.460	5.033.377
BANTEN	873.064	289.587	1.162.651
BALI	270.993	23.947	294.940
NUSA TENGGARA BARAT	802.141	81.588	883.729
NUSA TENGGARA TIMUR	637.969	97.994	735.963
KALIMANTAN BARAT	402.118	32.766	434.884
KALIMANTAN TENGAH	161.131	11.120	172.251
KALIMANTAN SELATAN	272.352	42.062	314.414
KALIMANTAN TIMUR	188.528	11.368	199.896
KALIMANTAN UTARA	31.412	4.769	36.181
SULAWESI UTARA	218.532	38.591	257.123
SULAWESI TENGAH	293.806	14.553	308.359
SULAWESI SELATAN	913.620	97.927	1.011.547
SULAWESI TENGGARA	287.713	5.648	293.361
GORONTALO	138.228	20.021	158.249
SULAWESI BARAT	142.843	7.908	150.751
MALUKU	168.922	1.683	170.605
MALUKU UTARA	73.289	3.873	77.162
PAPUA BARAT	92.869	5.302	98.171
PAPUA	446.157	3.654	449.811
INDONESIA	25.200.959	2.830.926	28.031.885

6. Jumlah Rumah Tangga *Pre-list* Awal, Verifikasi FKP, Usulan FKP dan *Pre-list* Pendataan

Provinsi	Prelist Awal	Pindah Meninggal dan Tidak Dikenal	Usulan FKP	Prelist Akhir
ACEH	682.673	87.850	167.489	762.312
SUMATERA UTARA	1.217.464	195.021	321.989	1.344.432
SUMATERA BARAT	462.177	56.749	90.135	495.563
RIAU	405.565	74.071	179.193	510.687
JAMBI	274.915	43.036	73.979	305.858
SUMATERA SELATAN	839.856	124.219	129.911	845.548
BENGGULU	205.715	39.907	56.670	222.478
LAMPUNG	1.049.825	171.293	170.765	1.049.297
KEP. BANGKA BELITUNG	100.493	25.019	17.358	92.832
KEP. RIAU	108.585	21.062	39.447	126.970
DKI JAKARTA	364.780	66.172	60.677	359.285
JAWA BARAT	4.606.996	516.720	744.206	4.834.482
JAWA TENGAH	4.812.093	644.792	621.038	4.788.339
DI YOGYAKARTA	657.323	157.427	38.205	538.101
JAWA TIMUR	5.033.377	598.343	540.452	4.975.486
BANTEN	1.162.651	287.763	165.521	1.040.409
BALI	294.940	34.205	24.667	285.402
NUSA TENGGARA BARAT	883.729	115.941	146.006	913.794
NUSA TENGGARA TIMUR	735.963	134.490	130.229	731.702
KALIMANTAN BARAT	434.884	50.728	144.834	528.990
KALIMANTAN TENGAH	172.251	27.796	47.213	191.668
KALIMANTAN SELATAN	314.414	56.648	111.163	368.929
KALIMANTAN TIMUR	199.896	33.931	58.558	224.523
KALIMANTAN UTARA	36.181	2.803	15.368	48.746
SULAWESI UTARA	257.123	44.825	62.686	274.984
SULAWESI TENGAH	308.359	43.847	67.016	331.528
SULAWESI SELATAN	1.011.547	139.084	135.099	1.007.562
SULAWESI TENGGARA	293.361	28.915	61.126	325.572
GORONTALO	158.249	23.730	15.909	150.428
SULAWESI BARAT	150.751	16.404	27.260	161.607
MALUKU	170.605	11.068	33.021	192.558
MALUKU UTARA	77.162	6.564	15.108	85.706
PAPUA BARAT	98.171	40.642	39.174	96.703
PAPUA	449.811	0	132.876	582.687
INDONESIA	28.031.885	3.921.065	4.684.348	28.795.168



7. Jumlah Rumah Tangga *Pre-list* Pendataan, Tidak Ditemukan, *Sweeping* dan Hasil Pendataan

Provinsi	Prelist Akhir	Tidak Ditemukan	Sweeping	Hasil Pendataan
ACEH	762.312	56.378	10.852	716.786
SUMATERA UTARA	1.344.432	132.889	57.861	1.269.404
SUMATERA BARAT	495.563	43.771	13.780	465.572
RIAU	510.687	79.141	15.442	446.988
JAMBI	305.858	31.806	8.486	282.538
SUMATERA SELATAN	845.548	84.533	29.683	790.698
BENGKULU	222.478	21.419	3.368	204.427
LAMPUNG	1.049.297	92.601	40.565	997.261
KEP. BANGKA BELITUNG	92.832	9.010	2.664	86.486
KEP. RIAU	126.970	26.566	6.708	107.112
DKI JAKARTA	359.285	58.312	13.851	314.824
JAWA BARAT	4.834.482	470.229	215.273	4.579.526
JAWA TENGAH	4.788.339	338.408	96.596	4.546.527
DI YOGYAKARTA	538.101	43.676	6.698	501.123
JAWA TIMUR	4.975.486	316.778	80.004	4.738.712
BANTEN	1.040.409	128.021	36.814	949.202
BALI	285.402	18.487	4.388	271.303
NUSA TENGGARA BARAT	913.794	76.717	19.582	856.659
NUSA TENGGARA TIMUR	731.702	56.460	26.067	701.309
KALIMANTAN BARAT	528.990	71.964	18.578	475.604
KALIMANTAN TENGAH	191.668	21.721	5.529	175.476
KALIMANTAN SELATAN	368.929	44.321	9.722	334.330
KALIMANTAN TIMUR	224.523	35.494	9.095	198.124
KALIMANTAN UTARA	48.746	7.296	1.326	42.776
SULAWESI UTARA	274.984	29.394	6.818	252.408
SULAWESI TENGAH	331.528	28.691	12.203	315.040
SULAWESI SELATAN	1.007.562	84.591	27.799	950.770
SULAWESI TENGGARA	325.572	26.045	8.699	308.226
GORONTALO	150.428	11.624	1.110	139.914
SULAWESI BARAT	161.607	14.855	3.252	150.004
MALUKU	192.558	17.988	7.031	181.601
MALUKU UTARA	85.706	6.660	3.277	82.323
PAPUA BARAT	96.703	443		96.260
PAPUA	593.305	105.714		487.591
INDONESIA	28.805.786	2.592.003	803.121	27.016.904

8. Jumlah Rumah Tangga Prelist Pendataan, Tidak Ditemukan, Sweeping dan Hasil Pendataan

Provinsi	Prelist Akhir	Tidak Ditemukan	Sweeping	Hasil Pendataan
ACEH	762.312	56.378	10.852	716.786
SUMATERA UTARA	1.344.432	132.889	57.861	1.269.404
SUMATERA BARAT	495.563	43.771	13.780	465.572
RIAU	510.687	79.141	15.442	446.988
JAMBI	305.858	31.806	8.486	282.538
SUMATERA SELATAN	845.548	84.533	29.683	790.698
BENGGULU	222.478	21.419	3.368	204.427
LAMPUNG	1.049.297	92.601	40.565	997.261
KEP. BANGKA BELITUNG	92.832	9.010	2.664	86.486
KEP. RIAU	126.970	26.566	6.708	107.112
DKI JAKARTA	359.285	58.312	13.851	314.824
JAWA BARAT	4.834.482	470.229	215.273	4.579.526
JAWA TENGAH	4.788.339	338.408	96.596	4.546.527
DI YOGYAKARTA	538.101	43.676	6.698	501.123
JAWA TIMUR	4.975.486	316.778	80.004	4.738.712
BANTEN	1.040.409	128.021	36.814	949.202
BALI	285.402	18.487	4.388	271.303
NUSA TENGGARA BARAT	913.794	76.717	19.582	856.659
NUSA TENGGARA TIMUR	731.702	56.460	26.067	701.309
KALIMANTAN BARAT	528.990	71.964	18.578	475.604
KALIMANTAN TENGAH	191.668	21.721	5.529	175.476
KALIMANTAN SELATAN	368.929	44.321	9.722	334.330
KALIMANTAN TIMUR	224.523	35.494	9.095	198.124
KALIMANTAN UTARA	48.746	7.296	1.326	42.776
SULAWESI UTARA	274.984	29.394	6.818	252.408
SULAWESI TENGAH	331.528	28.691	12.203	315.040
SULAWESI SELATAN	1.007.562	84.591	27.799	950.770
SULAWESI TENGGARA	325.572	26.045	8.699	308.226
GORONTALO	150.428	11.624	1.110	139.914
SULAWESI BARAT	161.607	14.855	3.252	150.004
MALUKU	192.558	17.988	7.031	181.601
MALUKU UTARA	85.706	6.660	3.277	82.323
PAPUA BARAT	96.703	443		96.260
PAPUA	593.305	105.714		487.591
INDONESIA	28.805.786	2.592.003	803.121	27.016.904



9. Jumlah Rumah Tangga *Pre-list* Awal, Verifikasi FKP, Usulan FKP dan *Pre-list* Pendataan

Provinsi	Hasil Pendataan	PNS, TNI, POLRI, BUMN/ BUMD	Tidak Layak Berdasarkan Hasil FKP	Hasil Akhir
ACEH	716.786	2.346	27.025	687.415
SUMATERA UTARA	1.269.404	1.827	54.597	1.212.980
SUMATERA BARAT	465.572	820	8.170	456.582
RIAU	446.988	602	12.797	433.589
JAMBI	282.538	307	22.752	259.479
SUMATERA SELATAN	790.698	770	39.554	750.374
BENGKULU	204.427	200	13.289	190.938
LAMPUNG	997.261	1.055	49.649	946.557
KEP. BANGKA BELITUNG	86.486	92	14.736	71.658
KEP. RIAU	107.112	142	4.080	102.890
DKI JAKARTA	314.824	231	13.614	300.979
JAWA BARAT	4.579.526	1.872	157.860	4.419.794
JAWA TENGAH	4.546.527	2.125	267.748	4.276.654
DI YOGYAKARTA	501.123	747	25.205	475.171
JAWA TIMUR	4.738.712	1.838	269.327	4.467.547
BANTEN	949.202	699	37.170	911.333
BALI	271.303	686	11.089	259.528
NUSA TENGGARA BARAT	856.659	566	18.741	837.352
NUSA TENGGARA TIMUR	701.309	1.508	7.053	692.748
KALIMANTAN BARAT	475.604	776	23.192	451.636
KALIMANTAN TENGAH	175.476	208	18.837	156.431
KALIMANTAN SELATAN	334.330	199	21.302	312.829
KALIMANTAN TIMUR	198.124	593	11.072	186.459
KALIMANTAN UTARA	42.776	73	1.739	40.964
SULAWESI UTARA	252.408	557	9.977	241.874
SULAWESI TENGAH	315.040	540	21.232	293.268
SULAWESI SELATAN	950.770	1.076	44.482	905.212
SULAWESI TENGGARA	308.226	840	2.625	304.761
GORONTALO	139.914	226	8.205	131.483
SULAWESI BARAT	150.004	271	14.841	134.892
MALUKU	181.601	638	4.573	176.390
MALUKU UTARA	82.323	223	4.362	77.738
PAPUA BARAT	96.260			96.260
PAPUA	487.591			487.591
INDONESIA	27.016.904	24.653	1.240.895	25.751.356

10. Jumlah Rumah Tangga Pre-list Awal, Hasil FKP, Hasil Pendataan dan Hasil Akhir (BDT 2015)

Provinsi	Prelist Awal	Hasil FKP (Prelist Pendataan)	Hasil Pendataan	Hasil Akhir (BDT 2015)
ACEH	682.673	762.312	767.054	687.415
SUMATERA UTARA	1.217.464	1.344.432	1.339.948	1.212.980
SUMATERA BARAT	462.177	495.563	489.968	456.582
RIAU	405.565	510.687	538.711	433.589
JAMBI	274.915	305.858	290.422	259.479
SUMATERA SELATAN	839.856	845.548	756.066	750.374
BENGKULU	205.715	222.478	207.701	190.938
LAMPUNG	1.049.825	1.049.297	946.029	946.557
KEP. BANGKA BELITUNG	100.493	92.832	63.997	71.658
KEP. RIAU	108.585	126.970	121.275	102.890
DKI JAKARTA	364.780	359.285	295.484	300.979
JAWA BARAT	4.606.996	4.834.482	4.647.280	4.419.794
JAWA TENGAH	4.812.093	4.788.339	4.252.900	4.276.654
DI YOGYAKARTA	657.323	538.101	355.949	475.171
JAWA TIMUR	5.033.377	4.975.486	4.409.656	4.467.547
BANTEN	1.162.651	1.040.409	789.091	911.333
BALI	294.940	285.402	249.990	259.528
NUSA TENGGARA BARAT	883.729	913.794	867.417	837.352
NUSA TENGGARA TIMUR	735.963	731.702	688.487	692.748
KALIMANTAN BARAT	434.884	528.990	545.742	451.636
KALIMANTAN TENGAH	172.251	191.668	175.848	156.431
KALIMANTAN SELATAN	314.414	368.929	367.344	312.829
KALIMANTAN TIMUR	199.896	224.523	211.086	186.459
KALIMANTAN UTARA	36.181	48.746	53.529	40.964
SULAWESI UTARA	257.123	274.984	259.735	241.874
SULAWESI TENGAH	308.359	331.528	316.437	293.268
SULAWESI SELATAN	1.011.547	1.007.562	901.227	905.212
SULAWESI TENGGARA	293.361	325.572	336.972	304.761
GORONTALO	158.249	150.428	123.662	131.483
SULAWESI BARAT	150.751	161.607	145.748	134.892
MALUKU	170.605	192.558	198.343	176.390
MALUKU UTARA	77.162	85.706	86.282	77.738
PAPUA BARAT	98.171	96.703	94.792	96.260
PAPUA	449.811	593.305	631.085	487.591
INDONESIA	28.031.885	28.805.786	26.525.257	25.751.356



11. Contoh Dokumen Daftar Final PBDDT2015.FKP


 REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PUSAT STATISTIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
 PBDDT2015.FKP

Halaman ... dari ... Halaman

RAHASIA

BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS


1	Provinsi	NUSA TENGGARA BARAT	5	2	Nama SLS lengkap dibawah Desa	Tingkat 1: DUSUN DASAN BARU
2	Kabupaten/Kota *	LOMBOK BARAT	6	1	Kelurahan/Negeri *	Tingkat 2: RT 002
3	Kecamatan	SEKOTONG	8	1	D	Tingkat 3:
4	Desa/Kelurahan/Negeri *	PELANGGAN	8	0	1	6
						Jumlah RTS di daftar ini

BLOK II. DAFTAR RTS

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) Lainnya	Alamat lengkap	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MAISAH	SANI	DUSUN DASAN BARU RT 002	
2	SUPAWAN	INAG SUPAWAN	DUSUN DASAN BARU RT 002	
3	MADIL	ATI	DUSUN DASAN BARU RT 002	
4	H.AZHAR		DUSUN DASAN BARU RT 002	
5	MAENAH	LAHMUDIN	DUSUN DASAN BARU RT 002	
6	HAMZAH WADI		DUSUN DASAN BARU RT 002	
7				
8				
9				
10				

* Corat yang tidak sesuai

12. Contoh Dokumen Kuesioner Rumah Tangga PBDDT2015.RT


 REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PUSAT STATISTIK
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
 PBDDT2015.RT

P000

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT

1	Provinsi	ACEH	1	1	6	Alamat
2	Kabupaten/Kota *		7	1	1	7
3	Kecamatan		8	1	1	8
4	Desa/Kelurahan/Negeri *		9	1	1	9
5	Nama SLS		10	1	1	10

II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

1	Tempat pencacahan	1	1	1	1	Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur
2	Nama pencacah		2	1	1	2
3	Tempat pencacahan		3	1	1	3
4	Nama pencacah		4	1	1	4

III. KETERANGAN PERUMAHAN

1	1. Status penggunaan bangunan tempat tinggal	1	1	1	1	1. Milik sendiri
2	2. Jenis lantai		2	1	1	2
3	3. Jenis lanta beratus		3	1	1	3
4	4. Jenis dinding beratus		4	1	1	4
5	5. Jenis atap beratus		5	1	1	5
6	6. Jumlah kamar tidur		6	1	1	6
7	7. Sumber air minum		7	1	1	7
8	8. Cara memperoleh air minum		8	1	1	8
9	9. a. Sumber pencahayaan utama		9	1	1	9
10	10. Bahan bakar energi utama untuk memasak		10	1	1	10
11	11. a. Programman fasilitas tempat buang air besar		11	1	1	11
12	12. Tempat pembuangan akhir limbah		12	1	1	12

V. KEPEMILIKAN ASSET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM

1	1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut:	1	1	1	1	1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut:
2	2. a. Jumlah motor MP 400 yang dimiliki oleh seluruh anggota rumah tangga		2	1	1	2
3	3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut:		3	1	1	3
4	4. Jumlah tanah yang dimiliki (suku)		4	1	1	4
5	5. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/besama?		5	1	1	5
6	6. Jika "Ya" (Ya = 1), silakan:		6	1	1	6
7	7. No. unit ART (Sesuai di buku RT)		7	1	1	7
8	8. Uraian usaha/pekerjaan		8	1	1	8
9	9. Keikutsertaan KB:		9	1	1	9
10	10. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan:		10	1	1	10
11	11. Suku berapa lama menggunakan metode tersebut?		11	1	1	11

VI. TINGKAT KEMISKINAN

1	1. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/besama?	1	1	1	1	1. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/besama?
2	2. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/besama?		2	1	1	2
3	3. b. Jika "Ya" (Ya = 1), silakan:		3	1	1	3
4	4. No. unit ART (Sesuai di buku RT)		4	1	1	4
5	5. Uraian usaha/pekerjaan		5	1	1	5
6	6. Keikutsertaan KB:		6	1	1	6
7	7. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan:		7	1	1	7
8	8. Suku berapa lama menggunakan metode tersebut?		8	1	1	8

Corat yang tidak sesuai

Var	Nilai	Keterangan
h_dwater1	1 ya 0 tidak	Sumber Air Minum rumah tangga adalah: Air kemasan bermerek
h_dwater2	1 ya 0 tidak	Sumber Air Minum rumah tangga adalah: Air isi ulang, Ledeng meteran
h_dwater3	1 ya 0 tidak	Sumber Air Minum rumah tangga adalah: Leding eceran, Sumur bor/pompa
h_hhsize	n jumlah ART = n Contoh: • 1 jumlah ART = 1 • 2 jumlah ART = 2 • 3 jumlah ART = 3	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)
h_hhsize2	n^2 kuadrat dari n Contoh: • 1 jika jumlah ART = 1 • 4 jika jumlah ART = 2 • 9 jika jumlah ART = 3	Jumlah Anggota Rumah Tangga Kuadrat
h_house2	1 ya 0 tidak	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga adalah: Kontrak/ Sewa
h_house3	1 ya 0 tidak	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga adalah: Dinas
h_lighting1	1 ya 0 tidak	Sumber Penerangan utama rumah tangga adalah: Listrik dengan daya 450 watt
h_lighting2	1 ya 0 tidak	Sumber Penerangan utama rumah tangga adalah: Listrik dengan daya 900 watt
h_lighting3	1 ya 0 tidak	Sumber Penerangan utama rumah tangga adalah: Listrik dengan daya 1.300 watt
h_lighting4	1 ya 0 tidak	Sumber Penerangan utama rumah tangga adalah: Listrik dengan daya lebih dari sama dengan 2200 watt
h_lighting5	1 ya 0 tidak	Sumber Penerangan utama rumah tangga adalah: Listrik tanpa meteran
h_lighting6	1 ya 0 tidak	Sumber Penerangan utama rumah tangga adalah: Listrik non PLN
h_lpcfloop	$x \log(a/b)$ a luas lantai b jumlah ART	Log Luas Lantai per Kapita
h_nage04	n jumlah ART berusia 0-4 tahun = n Contoh: • 1 jumlah ART berusia 0-4 tahun = 1 • 2 jumlah ART berusia 0-4 tahun = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang berusia 0-4 tahun
h_nage0519	n jumlah ART berusia 5-19 tahun = n Contoh: • 1 jumlah ART berusia 5-19 tahun = 1 • 2 jumlah ART berusia 5-19 tahun = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang berusia 5-19 tahun

Var	Nilai	Keterangan
h_nage2064	n jumlah ART berusia 20-64 tahun = n Contoh: • 1 jumlah ART berusia 20-64 tahun = 1 • 2 jumlah ART berusia 20-64 tahun = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang berusia 20-64 tahun
h_ngrad_d	n jumlah ART yang menamatkan D1/D2/D3 = n Contoh: • 1 jumlah ART yang menamatkan D1/D2/D3 = 1 • 2 jumlah ART yang menamatkan D1/D2/D3 = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang Menamatkan D1/D2/D3
h_ngrad_s	n jumlah ART yang menamatkan S1/S2/S3 = n Contoh: • 1 jumlah ART yang menamatkan S1/S2/S3 = 1 • 2 jumlah ART yang menamatkan S1/S2/S3 = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang Menamatkan S1/S2/S3
h_ngrad_sd	n jumlah ART yang menamatkan SD = n Contoh: • 1 jumlah ART yang menamatkan SD = 1 • 2 jumlah ART yang menamatkan SD = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang Menamatkan SD
h_ngrad_sma	n jumlah ART yang menamatkan SLTA = n Contoh: • 1 jumlah ART yang menamatkan SLTA = 1 • 2 jumlah ART yang menamatkan SLTA = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang Menamatkan SLTA
h_ngrad_smp	n jumlah ART yang menamatkan SLTP = n Contoh: • 1 jumlah ART yang menamatkan SLTP = 1 • 2 jumlah ART yang menamatkan SLTP = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) yang Menamatkan SLTP
h_nmale	n jumlah ART laki-laki = n Contoh: • 1 jumlah ART laki-laki = 1 • 2 jumlah ART laki-laki = 2	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) laki-laki
h_nstudentd	n jumlah ART bersekolah di D1/D2/D3 = n Contoh: • 1 jumlah ART bersekolah di D1/D2/D3 = 1 • 2 jumlah ART bersekolah di D1/D2/D3 = 2	Jumlah ART yang bersekolah di D1/D2/D3



Var	Nilai	Keterangan
h_nstudents	n jumlah ART bersekolah di S1/S2/S3 = n Contoh: • 1 jumlah ART bersekolah di S1/S2/S3 = 1 • 2 jumlah ART bersekolah di S1/S2/S3 = 2	Jumlah ART yang bersekolah di S1/S2/S3
h_nstudentsd	n jumlah ART bersekolah di SD = n Contoh: • 1 jumlah ART bersekolah di SD = 1 • 2 jumlah ART bersekolah di SD = 2	Jumlah ART yang bersekolah di SD
h_nstudentsma	n jumlah ART bersekolah di SLTA = n Contoh: • 1 jumlah ART bersekolah di SLTA = 1 • 2 jumlah ART bersekolah di SLTA = 2	Jumlah ART yang bersekolah di SLTA
h_nstudentsmp	n jumlah ART bersekolah di SMP = n Contoh: • 1 jumlah ART bersekolah di SMP = 1 • 2 jumlah ART bersekolah di SMP = 2	Jumlah ART yang bersekolah di SMP
h_pwater1	1 ya 0 tidak	Cara rumah tangga memperoleh air minum adalah dengan: Membeli eceran atau berlangganan
h_sec1_stat1	n jumlah ART Berusaha Sendiri di Pertanian = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri di Pertanian = 1 • 2 jumlah Berusaha Sendiri di Pertanian = 2	Jumlah ART yang bekerja di Pertanian dengan Status sebagai Berusaha Sendiri
h_sec1_stat2	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Pertanian = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Pertanian = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Pertanian = 2	Jumlah ART yang bekerja di Pertanian dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar
h_sec1_stat3	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Pertanian = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Pertanian = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Pertanian = 2	Jumlah ART yang bekerja di Pertanian dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar

Var	Nilai	Keterangan
h_sec1_stat4	n jumlah ART Pegawai di Pertanian = n Contoh: • 1 jumlah ART Pegawai di Pertanian = 1 • 2 jumlah ART Pegawai di Pertanian = 2	Jumlah ART yang bekerja di Pertanian dengan Status sebagai Pegawai
h_sec1_stat5	n jumlah ART Pekerja Bebas di Pertanian = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja Bebas di Pertanian = 1 • 2 jumlah ART Pekerja Bebas di Pertanian = 2	Jumlah ART yang bekerja di Pertanian dengan Status sebagai Pekerja bebas
h_sec1_stat6	n jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Pertanian = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Pertanian = 1 • 2 jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Pertanian = 2	Jumlah ART yang bekerja di Pertanian dengan Status sebagai Pekerja Tak Dibayar
h_sec2_stat1	n jumlah ART Berusaha Sendiri di Industri = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri di Industri = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri di Industri = 2	Jumlah ART yang bekerja di Industri dengan Status sebagai Berusaha Sendiri
h_sec2_stat2	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Industri = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Industri = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Industri = 2	Jumlah ART yang bekerja di Industri dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar
h_sec2_stat3	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Industri = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Industri = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Industri = 2	Jumlah ART yang bekerja di Industri dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar
h_sec2_stat4	n jumlah ART Pegawai di Industri = n Contoh: • 1 jumlah ART Pegawai di Industri = 1 • 2 jumlah ART Pegawai di Industri = 2	Jumlah ART yang bekerja di Industri dengan Status sebagai Pegawai



Var	Nilai	Keterangan
h_sec2_stat5	n jumlah ART Pekerja bebas di Industri = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja bebas di Industri = 1 • 2 jumlah ART Pekerja bebas di Industri = 2	Jumlah ART yang bekerja di Industri dengan Status sebagai Pekerja bebas
h_sec2_stat6	n jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Industri = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Industri = 1 • 2 jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Industri = 2	Jumlah ART yang bekerja di Industri dengan Status sebagai Pekerja Tak Dibayar
h_sec3_stat1	n jumlah ART Berusaha Sendiri di Listrik & Gas = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri di Listrik & Gas = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri di Listrik & Gas = 2	Jumlah ART yang bekerja di Listrik & Gas dengan Status sebagai Berusaha Sendiri
h_sec3_stat2	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Listrik & Gas = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Listrik & Gas = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Listrik & Gas = 2	Jumlah ART yang bekerja di Listrik & Gas dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar
h_sec3_stat3	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Listrik & Gas = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Listrik & Gas = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Listrik & Gas = 2	Jumlah ART yang bekerja di Listrik & Gas dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar
h_sec3_stat4	n jumlah ART Pegawai di Listrik & Gas = n Contoh: • 1 jumlah ART Pegawai di Listrik & Gas = 1 • 2 jumlah ART Pegawai di Listrik & Gas = 2	Jumlah ART yang bekerja di Listrik & Gas dengan Status sebagai Pegawai
h_sec3_stat5	n jumlah ART Pekerja Bebas di Listrik & Gas = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja Bebas di Listrik & Gas = 1 • 2 jumlah ART Pekerja Bebas di Listrik & Gas = 2	Jumlah ART yang bekerja di Listrik & Gas dengan Status sebagai Pekerja bebas

Var	Nilai	Keterangan
h_sec3_stat6	n jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Listrik & Gas = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Listrik & Gas = 1 • 2 jumlah ART Pekerja Tak Dibayar di Listrik & Gas = 2	Jumlah ART yang bekerja di Listrik & Gas dengan Status sebagai Pekerja Tak Dibayar
h_sec4_stat1	n jumlah ART Berusaha Sendiri di Konstruksi = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri di Konstruksi = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri di Konstruksi = 2	Jumlah ART yang bekerja di Konstruksi dengan Status sebagai Berusaha Sendiri
h_sec4_stat2	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Konstruksi = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Konstruksi = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar di Konstruksi = 2	Jumlah ART yang bekerja di Konstruksi dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Tak Dibayar
h_sec4_stat3	n jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Konstruksi = n Contoh: • 1 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Konstruksi = 1 • 2 jumlah ART Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar di Konstruksi = 2	Jumlah ART yang bekerja di Konstruksi dengan Status sebagai Berusaha Sendiri dengan Buruh Dibayar
h_sec4_stat4	n jumlah ART Pegawai di Konstruksi di SMP = n Contoh: • 1 jumlah ART Pegawai di Konstruksi = 1 • 2 jumlah ART Pegawai di Konstruksi = 2	Jumlah ART yang bekerja di Konstruksi dengan Status sebagai Pegawai
h_sec4_stat5	n jumlah ART Pekerja Bebas di Konstruksi = n Contoh: • 1 jumlah ART Pekerja Bebas di Konstruksi = 1 • 2 jumlah ART Pekerja Bebas di Konstruksi = 2	Jumlah ART yang bekerja di Konstruksi dengan Status sebagai Pekerja bebas
h_septic1	1 ya 0 tidak	Tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga adalah: septic tank
h_septic2	1 ya 0 tidak	Tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga adalah: lubang tanah
h_septic3	1 ya 0 tidak	Tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga adalah: Pembuangan Alam
h_tfloor1	1 ya 0 tidak	Jenis lantai terluas milik rumah tangga adalah: Marmer/granit, Keramik, Parket/vinil/permadani



Var	Nilai	Keterangan
h_tfloor2	1 ya 0 tidak	Jenis lantai terluas milik rumah tangga adalah: Ubin/tegel/braso
h_tfloor3	1 ya 0 tidak	Jenis lantai terluas milik rumah tangga adalah: Kayu/papan kualitas tinggi, Semen/bata merah, Bambu, Kayu/papan kualitas rendah
h_toiltype1	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Pribadi, dengan jenis kloset Leher Angsa
h_toiltype2	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Pribadi, dengan jenis kloset Plengsengan
h_toiltype3	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Pribadi, dengan jenis kloset Plengsengan
h_toiltype4	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Bersama, dengan jenis kloset Leher Angsa
h_toiltype5	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Bersama, dengan jenis kloset Plengsengan
h_toiltype6	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Bersama, dengan jenis kloset Cubluk/lain
h_toiltype7	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Publik, dengan jenis kloset Leher Angsa
h_toiltype8	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Publik, dengan jenis kloset Plengsengan
h_toiltype9	1 ya 0 tidak	Tipe Toilet milik rumah tangga adalah: Publik, dengan jenis kloset Cubluk/lain
h_roof1	1 ya 0 tidak	Jenis atap terluas di tempat tinggal rumah tangga adalah: beton/genteng beton
h_roof2	1 ya 0 tidak	Jenis atap terluas di tempat tinggal rumah tangga adalah: genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat
h_roof3	1 ya 0 tidak	Jenis atap terluas di tempat tinggal rumah tangga adalah: Asbes, Seng, Sirap
h_twall1	1 ya 0 tidak	Jenis dinding terluas di tempat tinggal rumah tangga adalah: Tembok
h_twall2	1 ya 0 tidak	Jenis dinding terluas di tempat tinggal rumah tangga adalah: kayu
h_twall4	1 ya 0 tidak	Jenis dinding terluas di tempat tinggal rumah tangga adalah: jenis lainnya
pds_ikg	1-100, nilai semakin mendekati 100 maka tingkat kesulitan geografis desa semakin tinggi.	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)

14. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Lokasi FKP dan RTS menurut Provinsi

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Lokasi	Perkiraan RTS
1. Aceh	23	289	6.512	6.839	682.673
2. Sumatera Utara	33	440	6.104	6.419	1.217.464
3. Sumatera Barat	19	179	1.145	1.272	462.177
4. Riau	12	164	1.835	2.033	405.565
5. Jambi	11	138	1.551	1.689	274.915
6. Sumatera Selatan	15	231	3.237	3.650	839.556
7. Bengkulu	10	127	1.532	1.602	205.715
8. Lampung	14	225	2.632	3.038	1.049.825
9. Bangka Belitung	7	47	381	405	94.412
10. Kepulauan Riau	7	66	415	450	108.352
11. DKI Jakarta	6	44	267	2.723	364.780
12. Jawa Barat	26	626	5.962	10.738	4.606.996
13. Jawa Tengah	35	573	8.578	11.113	4.811.093
14. D.I. Yogyakarta	5	78	438	1.123	566.933
15. Jawa Timur	38	664	8.502	11.182	5.033.377
16. Banten	8	155	1.551	2.633	992.363
17. Bali	9	57	716	794	294.940
18. Nusa Tenggara Barat	10	116	1.141	1.202	873.729
19. Nusa Tenggara Timur	21	306	3.270	3.438	735.963
20. Kalimantan Barat	14	176	2.109	2.367	434.884
21. Kalimantan Tengah	14	136	1.569	1.995	172.500
22. Kalimantan Selatan	13	152	2.008	2.667	314.414
23. Kalimantan Timur	14	153	1.505	1.985	236.077
24. Sulawesi Utara	15	167	1.836	2.085	257.123
25. Sulawesi Tengah	11	172	1.986	2.179	308.359
26. Sulawesi Selatan	24	306	3.030	3.729	1.011.547
27. Sulawesi Tenggara	12	209	2.272	2.493	293.361
28. Gorontalo	6	77	736	757	158.249
29. Sulawesi Barat	5	69	648	711	150.751
30. Maluku	11	113	1.088	1.511	170.605
31. Maluku Utara	9	115	1.196	1.311	77.162
32. Papua Barat	Menggunakan Pendekatan Berbeda				
33. Papua	Menggunakan Pendekatan Berbeda				
Total	457	6.370	75.752	96.133	27.205.860



Referensi

- Agresti, A. (1990), *Categorical Data Analysis*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Akaike, H. (1974), "A new look at the statistical model identification." *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19:716-723.
- Atkinson, A.B. (1987), "On the Measurement of Poverty." *Econometrica* 55, 749-64.
- Badan Pusat Statistik (2005), *Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin PSE 2005*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2012), *Laporan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2012), *Penghitungan dan Analisis Tingkat Kemiskinan 2012*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2015), *Pemutakhiran Basis data Terpadu: Pedoman Forum Konsultasi Publik*. Buku 2.
- Badan Pusat Statistik (2015), *Pemutakhiran Basis data Terpadu: Pedoman Pencacahan*. Buku 2.
- Bidani, B., and M. Ravallion (1992), "Constructing a Consistent Poverty Profile." *Mimeo. Poverty Analysis and Policy Division*. World Bank, Washington DC.
- Castano, E. (2002), "Proxy Means Test Index for Targeting Sosial Programs: Two Methodologies and Empirical Evidence." *Lecturas de Economia - Lect.Econ-No.56*, Medellin.
- Clark, S., R. Hemming and D. Ulph (1981), "On Indices for the Measurement of Poverty." *Economic Journal* 91: 515-526.
- Cox, T.F., and M.A.A. Cox (2001), *Multidimensional Scaling*. Monographs on Statistics and Applied Probability 99, Second Edition, Chapman & Hall/CRC.
- Deaton, A. (1997), *The Analysis of Household Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Elbers, C., J.O. Lanjouw, and P. Lanjouw (2002), "Micro-Level Estimation of Welfare." *Policy Research Paper 2911*. The World Bank, Washington DC.
- Grosh, M., and J. Baker (1995), "Proxy Means Test for Targeting Sosial Programs: Simulations and Speculation." *Living Standard Measurement Study Working Paper No. 118*. The World Bank, Washington DC.
- Hastie T., R. Tibshirani, and J. Friedman (2001), *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer.
- Marsisno, W., and S. Baidowi (2011), "Panduan Penghitungan Indeks Kekayaan (Wealth Index) dengan Analisis Komponen Utama untuk Data PPLS 2011." *Mimeo*. BPS, Jakarta.
- Press, W.H., S. Teukolsky, W.T. Vetterling, and B.P. Flannery (2007), *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press.
- Pritchett, L., S. Sumarto, and A. Suryahadi (2002), "Targeted Programs in an Economic Crisis: Empirical Findings from Indonesia's Experience." *CID Working Paper No.95*, Harvard University.
- Ravallion, M. (1998), "Poverty Lines in Theory and Practice." *Living Standards Measurement Study Working Paper No. 133*. The World Bank, Washington DC.
- Ravallion, M. and B. Bidani (1994), "How Robust Is a Poverty Profile?" *World Bank*

- Economic Review* 8(1): 75-102.
- SAS Institute Inc. (2009), *Base SAS 9.2 Procedures Guide*. Cary, NCS: Sas Institute Inc.
- Sculley, D. (2010), "Combined Regression and Ranking." Google Inc., Pittsburgh, PA, USA.
- Sen, A. (1976), "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement." *Econometrica* 46: 437-446.
- Sen, A. (1983), "Social Theory, Social Understanding, and Political Action." In *Social Theory and Political Practice*. Ed. Christopher Lloyd. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press.
- Skoufias, E., B. Davis, and J.R. Behrman (1999), "An Evaluation of the Selection of Beneficiary Households in the Education, Health, and Nutrition Program (PROGRESA) of Mexico." *Final Report*, International Food Policy Research Institute, Washington DC.
- Sumarto, S., D. Suryadarma, and A. Suryahadi (2007), "Predicting Consumption Poverty using Non-Consumption Indicators: Experiments using Indonesian Data." *Social Indicators Research* 81(3): 543-578.
- Sumarto, S., A. Suryahadi, and L. Pritchett (2000), "Safety Nets and Safety Ropes - Who Benefited from Two Indonesian Crisis Programs - the "poor" or the "shocked"?" *Policy Research Working Paper Series* 2436. The World Bank, Washington DC.
- Tukey, J.W. (1962), "The Future of Data Analysis." *Annals of Mathematical Statistics*, 33:22.
- Velez, C.E., E. Castano, and R. Deutsch (1999), "An Economic Interpretation of Targeting System for Social Programs: The Case of Colombia's SISBEN." *Lecturas de Economia-Lect.Econ.-No.56*. Medellin.
- Watts, H.W. (1968), "The Measurement of Poverty - An Exploratory Exercise." University of Wisconsin - Institute for Research on Poverty. Discussion Papers 12-68.
- World Bank Institute (2002), "Dasar-dasar Analisis Kemiskinan." Edisi Terjemahan. BPS, Jakarta.
- Young, F., J.D. Leeuw, and Y. Takane (1976), "Regression with Qualitative and Quantitative Variables: An Alternating Least Squares Method with Optimal Scaling Features." *Psychometrika* 41:4.









TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812

Fax : (021) 3912511

E-mail : info@tnp2k.go.id

Website : www.tnp2k.go.id



Dicetak pada kertas daur ulang

